**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI EKSPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN *TELEGRAPHIC TRANSFER***

**(STUDI DI PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO)**

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

**MUHAMMAD SYAWAL LUBIS**

**NPM : 22911001**



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi di PT. Sumatera Ocean Transindo)

Judul

Nama : Muhammad Syawal Lubis

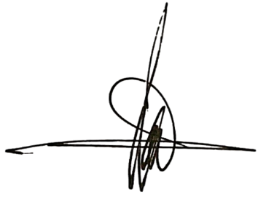
NPM : 22911001

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

****

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ariman Sitompul S.H., M.H Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704 NIDN : 8952620021**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi di PT. Sumatera Ocean Transindo)

Judul

Nama : Muhammad Syawal Lubis

NPM : 22911001

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

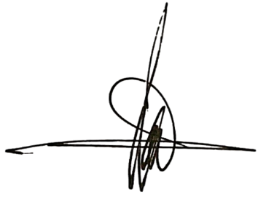
Pada Tanggal: 26 April 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

****

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Ariman Sitompul S.H., M.H Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN : 0113028704 NIDN : 8952620021**

**Penguji III**

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

Telah Diuji Pada :

Tanggal: 26 April 2024

**TIM PENGUJI TESIS :**

1. Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

Anggota : 1. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H

: 2. Dr. Ruslan, SH, M.H

3. Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syawal Lubis

NPM : 22911001

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 4 September 1978

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sekata LK XII No. 9 Medan

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul *”Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan Telegraphic Transfer (Studi di PT. Sumatera Ocean Transindo)”* adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Syawal Lubis

22911001

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syawal Lubis

NPM : 22911001

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 4 September 1978

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sekata LK XII No. 9 Medan

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul:*”Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan Telegraphic Transfer (Studi di PT. Sumatera Ocean Transindo)”* Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusive ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Syawal Lubis

NPM 22911001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Data Pribadi** / *Personal Details*

Nama / *Name* : Muhammad Syawal Lubis

Tempat/Tgl Kelahiran / *Date of Birth* : Medan, 4 September 1978

NPM : 22911001

Alamat : Jl. Sekata LK XII No. 9 Medan

Agama / *Religion* : Islam

Jenis Kelamin / *Gender*  : Laki-Laki

Kode Post / *Postal Code* : -

Nomor Telepon / *Phone* : 081265017168

Email :-

Status Marital / *Marital Status* : Sudah Kawin

Warga Negara / *Nationality* : Indonesia

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

Jenjang Pendidikan

1. -

2. -

3. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2003

4. Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Tahun 2024

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1.

2.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Syawal Lubis

21911001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI EKSPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN TELEGRAPHIC TRANSFER (STUDI DI PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO)

**ABSTRAK**

MUHAMMAD SYAWAL LUBIS1

Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H.\*\*

Dr. Ruslan, SH, M.H. \*\*\*

Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor disebut juga dengan perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen karena pelaku usaha yang memiliki unsur asing biasanya tertuang dalam suatu kontrak komersial atau biasa disebut dengan Kontrak Bisnis Internasional, dalam transaksi ekspor impor bisa dilakukan dengan lisan atau tulisan. Jika dilakukan dengan tulisan maka akan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan *sales contract,* yang didalamnya terdapat tata cara penyelesaian pembayaran ekspor-impor serta hak dan kewajiban eksportir dan importer, Metode pembayaran yang biasa dipakai PT. Sumatera Ocean Transindo dalam ekspor barang menggunakan sistem dibayar dimuka dengan menggunakan *telegraphic transfer* sebagai media pembayaran. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor barang PT. Sumatera Ocean Transindo sering menghadapi masalah dalam proses pelunasan barang ekspor.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan keadaan ataupun gejala yang tampak bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer*. dengan Menggunakan sumber data dari data primer dan data sekunder, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian bahwa Pengaturan sistem pembayaran lahir berdasarkan perjanjian kesepakatan antara eksportir dan importer dengan menggunakan metode *Advance Payment* dengan sistem pembayaran *telegraphic transfer* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/11/PBI/2003 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa. Dan dalam tahapan kontraktual pembentukan *sales contract,* PT. Sumatera Ocean Transindo selaku pihak eksportir tidak mencantumkan forum yang dipakai apabila terjadi wanprestasi serta tidak mencantumkan klausul – klausul hak dan kewajiban.

PT. Sumatera Ocean Transindo selaku pihak eksportir dalam melakukan Perjanjian Jual Beli barang ekspor sebaiknya menggunakan Perjanjian secara tertulis dalam melakukan perjanjian dengan importir, dan menentukan forum apa yang akan digunakan apabila pihak importir tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalam

*sale’s contrac*.

**Kata Kunci:Telegraphic Transfer, Ekspor, Impor**

1) Mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa

\*\*) Pembimbing I

\*\*\*) Pembimbing II

i

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPORTIR DALAM TRANSAKSI EKSPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN TELEGRAPHIC TRANSFER (STUDI DI PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO)

**ABSTRAK**

MUHAMMAD SYAWAL LUBIS1

Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H.\*\*

Dr. Ruslan, SH, M.H. \*\*\*

Foreign trade or export-import transactions are also called document trade because almost all activities are proven or stated in the form of documents because business actors who have foreign elements are usually stated in a commercial contract or what is usually called an International Business Contract, in export-import transactions can be carried out using verbal or written. If it is done in writing, it will be stated in the form of an agreement called a sales contract, which contains procedures for settling export-import payments as well as the rights and obligations of the exporter and importer. The payment method usually used by PT. Sumatra Ocean Transindo in exporting goods uses a prepaid system using telegraphic transfer as a payment medium. In carrying out goods export activities, PT. Sumatra Ocean Transindo often faces problems in the process of paying off export goods.

This research uses a type of empirical juridical research which is qualitative descriptive research, namely research that describes or depicts facts and circumstances or symptoms that appear aimed at describing or illustrating existing facts relating to legal protection for exporters in goods export transactions using Telegraphic Transfer. by using data sources from primary data and secondary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials through library research which is analyzed qualitatively.

The research results show that payment system arrangements are based on an agreement between exporters and importers using the Advance Payment method with a telegraphic transfer payment system in accordance with Government Regulation no. 1 of 1982 and Article 8 of Bank Indonesia Regulation Number: 5/11/PBI/2003 concerning the implementation of import exports and foreign exchange traffic. And in the contractual stage of forming a sales contract, PT. Sumatra Ocean Transindo as the exporter does not include the forum to be used in the event of default and does not include rights and obligations clauses.

PT. Sumatra Ocean Transindo as the exporter in entering into a Sale and Purchase Agreement for exported goods should use a written agreement in entering into an agreement with the importer, and determine what forum will be used if the importer does not carry out the obligations stated in the sale's contract

**Kata Kunci:Telegraphic Transfer, Ekspor, Impor**

1) Mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa

\*\*) Pembimbing I

\*\*\*) Pembimbing II

i

**KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu’alaikum Wr. Wbr.**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi di PT. Sumatera Ocean Transindo)”**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam Tesis, terutama sekali kepada:

1. Teristimewa diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada istri saya Ayu Pratiwi,SH.,M.Kn dan Ibunda Lasmi yang telah mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis, membimbing penulis, dan selalu mendengarkan keluh kesah saat susah dan senangnya penulis dalam pembuatan Tesis ini, tak pernah lelah memberikan bantuan materiil, moril, maupun do’a. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada istri dan ibunda.
2. Bapak Dr. Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, M.A. Selaku Rektor Universitas Dharmawangsa, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.
3. Ibu Dr. Azmiati Zuliah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa

ii

1. Bapak Dr. Ariman Sitompul, SH., M.H. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatian hingga selesai penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Ruslan, SH, M.H. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatian hingga selesai penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kusbianto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberi kritik dan saran hingga selesai penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum.
5. Seluruh Staf Pegawai di Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses akademik penulis.
6. Kepada orang tua kedua penulis yakni Ibunda Kemalawati, Amd. Keb. yang senantiasa memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Kepada kakakku Dra.Tetty Zuharna Lubis, Halimah Tusya’diah Lubis,S.Ag, adikku Rafida Lubis,SE yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Kepada Direktur dan seluruh staf PT. Sumatera Ocean Transindo yang telah mendukung dan membantu riset sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Sahabat penulis serta Rekan-Rekan perjuangan stambuk 2022 Program Pascasarjana Universitas Dharmawangsa yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terus memberikan kritik dan saran serta ikut mewarnai masa perkuliahan penulis hingga sampai pada saat penulis selesai menyusun tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca tesis ini. Namun besar harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih sedalam-dalamnya kepada kitasemua dan semoga do’a yang teleh diberikan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Medan, 26 April 2024

Penulis,

**Muhammad Syawal Lubis**

**22911001**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ...........................................................................................

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI ......................................................................

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .........................................................

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................

ABSTRAK .......................................................................................................... i

ABSTRACK .................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................... ii

[DAFTAR ISI ii](#_TOC_250026)i

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250025)

1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250024)
2. [Rumusan Masalah 7](#_TOC_250023)
3. [Tujuan Penelitian](#_TOC_250022) 8
4. [Manfaat Penelitian](#_TOC_250021) 8
5. [Keaslian Penelitian](#_TOC_250020) 8
6. [Kerangka Teori dan Konsepsi 1](#_TOC_250019)0
7. [Metode Penelitian 21](#_TOC_250016)

BAB II PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO

1. Dasar Berlakunya Sistem Pembayaran melalui Telegraphic

Transfer pada PT. Sumatera Ocean Transindo [28](#_TOC_250010)

1. Alasan Terjadinya Sale’s Contrac pada PT. Sumatera Ocean Transindo [54](#_TOC_250009)

BAB III PELAKSANAAN EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. OCEAN TRANSINDO

1. [PT. Sumatera Ocean Transindo 59](#_TOC_250006)
2. Dokumen Ekspor PT. Sumatera Ocean Transindo 63
3. Prosedur Ekspor PT. Sumatera Ocean Transindo 66
4. Metode Pembayaran PT. Sumatera Ocean Transindo 67
5. Sistem Telegraphic Transfer PT. Sumatera Ocean Transindo 79

iii

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI IMPORTIR DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI SISTEM TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO

1. Hak dan Kewajiban Eksportir dalam Melakukan Pembayaran melalui Sistem Trelegraphic Transfer [85](#_TOC_250005)
2. Hak dan Kewajiban Eksportir dalam Melakukan Pembayaran melalui Sistem Trelegraphic Transfer 86
3. Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan Telegraphic Transfer 87

[BAB V PENUTUP](#_TOC_250003)

1. [Kesimpulan 103](#_TOC_250002)
2. [Saran 104](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA](#_TOC_250000)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang kaya akan lautan yang lebih luas dari daratan, maka sarana angkutan laut merupakan sarana pengiriman barang yang dianggap lebih mudah dan murah, dalam pengiriman barang melalui laut terdapat beberapa pihak antara lain pihak pengirim (eksportir), pengangkut, dan penerima (importir), tanggung jawab eksportir sebagai penjual adalah menyerahkan barang ekspor ke tangan pembeli (importir). eksportir membutuhkan jasa pengangkut untuk menyerahkan barang-barang ekspor.

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.[[1]](#footnote-1)

Pelaksanaan ekspor impor ini tentunya melibatkan berbagai pihak, yakni instansi maupun beberapa lembaga pemerintahan antara lain seperti Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal dan Bea Cukai, Badan Wilayah Bea dan Cukai, Badan Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai.1 Kegiatan ekspor impor harus melalui persetujuan pihak instansi tersebut dengan melakukan beberapa tahapan seperti pendaftaran barang ekspor/impor yang harus dilakukan eksportir pada pihak kepabeanan atau PEB (pemberitahuan ekspor barang) dan PIB (pemberitahuan impor barang) untuk barang impor, sebelum barang dapat di ekspor atau diimpor, kemudian pemeriksaan fisik barang ekspor/impor dan sebagainya. Eksportir maupun importir selain terlibat dengan instansi terkait,[[2]](#footnote-2) eksportir dan importir juga harus melalui tiga tahapan; Tahap pertama proses persetujuan jual beli, kemudian tahap kedua proses pembayaran, dan tahap ketiga yakni penyerahan barang.[[3]](#footnote-3)

1

Kegiatan perdagangan internasional yang meliputi ekspor dan impor dapat dilaksanakan dengan baik, apabila penyediaan barang dan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan dengan baik oleh kedua belah pihak yang terlibat transaksi.[[4]](#footnote-4) Perdagangan ekspor impor termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi, karena eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor. Salah satu risiko yang dihadapi oleh eksportir adalah apabila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak, Risiko tersebut dapat dihindari apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis atau ke dalam bentuk kontrak dagang (*sales contract*).

Eksportir akan mengirimkan *copy Invoice* dan *Packing List* atas pesanan barang yang dikirimkan dengan diilampirkan bukti pengapalan berupa copy *Bill of Lading, Certificate of Origin* dan *Fumigation Certificate* melalui surat elektronik atau facsimile kepada pembeli. Pembeli akan melakukan pembayaran pelunasan pemesanan atas dasar dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum kapal pengangkut barang tersebut tiba di pelabuhan tujuan. Pembeli melakukan pembayaran dengan metode *telegraphic transfer* melalui bank pembeli di negara dimana pembeli berkedudukan ke rekening penjual. Penjual berkewajiban mengirimkan bukti fisik asli seperangkat dokumen yang terdiri dari *Invoice, Packing List, Bill of lading, Certificate of Origin*, dan *Fumigation Certificate* kepada pembeli yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil barang pesanan di pelabuhan, atau dikenal dengan proses *custom clearance*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa menyebutkan beberapa cara pembayaran, yaitu:

1. Pembayaran di muka (advance payment) dalam metode ini, importir harus melakukan pembayaran diawal kepada eksportir sebelum barang -barang tersebut dikirimkan. Keuntungannya disini adalah eksportir bisa mendapatkan sejumlah uang untuk mempersiapkan barang ekspornya. Pembayaran di muka ini bisa dilakukan dengan tunai melalui Telegraphic Transfer (TT);
2. Wesel Inkaso (collection draft) dengan kondisi :
   * + 1. Document Againts Payment (D/P), importir tidak akan menitipkan uangnya di bank pada awal transaksi, tetapi eksportir harus tetap mengirimkan segala dokumen ekspor melalui bank eksportir yang ditujukan ke bank importir. Namun disini bank importir akan menyerahkan dokumen ekspor tersebut setelah importir melakukan pembayaran;
       2. Document Againts Acceptance (D/A), sama dengan metode pembayaran Document Againts Payment (D/P) namun perbedaannya disini hanya memerlukan prsetujuan pembayaran dari importir terlebih dahulu untuk menerima segala dokumen ekspor yang dibutuhkan dari eksportir, biasanya dalam jangka waktu perjanjian 30, 60, atau 90 hari setelah menyetujuinya.
3. Perhitungan kemudian (open account) metode pembayaran dimana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum barang diterima oleh importer di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir;
4. Konsinyasi (consignment) ialah eksportir mengirimkan barang kepada importir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir, namun barang yang tidak terjual akan dikembalikan lagi ke pihak eksportir. Pembayaran akan dilakukan setelah barang terjual dan sesuai nilai yang terjual tanpa adanya jaminan apapun;
5. Cara pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli

Kelima cara pembayaran diatas, metode pembayaran yang banyak dipergunakan adalah melalui *wire transfer* atau juga dikenal dengan istilah *telegraphic transfer*, hal ini dipilih oleh para eksportir karena cara pembayaran melalui transfer bank dianggap lebih sederhana dan tidak memerlukan dokumen yang bermacam- macam.

Pihak penjual (eksportir) akan berusaha bagaimana cara sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kewajiban untuk mengirim atau menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli (importir), dan menerima haknya atas pembayaran dari barang-barang yang telah dikirim dan diserahkannya kepada pembeli (importir). Sebaliknya pembeli (importir) harus memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibannya membayar dan menerima barang-barang yang dibelinya itu dengan sebaik- baiknya.

Permasalahan yang dapat timbul dalam perdagangan internasional menyangkut masalah pembayaran harga barang yaitu bila terjadi suatu perjanjian jual beli barang (sales contract) antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) untuk sejumlah barang tertentu, maka dalam perjanjian jual beli tersebut eksportir mensyaratkan pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian setelah menerima uang dimaksud pihak eksportir baru akan mengirimkan barang-barang tersebut. Pada sisi lain pembeli dapat mencantumkan klausula agar pihak eksportir harus mengirimkan barang- barangnya terlebih dahulu ke tempat pembeli, dan dengan diterimanya barang-barang tersebut, barulah kemudian pihak pembeli akan mengirimkan uangnya. Hal ini bertujuan bahwa para pihak bermaksud mengamankan kepentingan masing-masing terlebih dahulu.

Metode Pembayaran yang selama ini banyak digunakan dalam suatu transaksi pembayaran dikalangan pelaku usaha Ekspor - Impor, yang terbagi atas pembayaran dengan metode Non Letter of Credit ( Non LC) dan Metode Letter of Credit (L/C), Dalam proses pembayarannya para pihak memakai system pembayaran dengan metode *telegraphic transfer,* Sistem pembayaran melalui *telegraphic transfer* memiliki risiko bagi eksportir, ketika barang pesanan telah dikirimkan kepada pembeli di luar negeri sementara pembeli tidak melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak eksportir. Pihak otoritas pelabuhan dengan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan lelang barang tersebut sampai dengan jangka waktu tertentu. Pihak pembeli secara teori tidak dapat mengambil barang pesanan tersebut tanpa adanya dokumen-dokumen asli tersebut tetapi faktanya barang dapat diambil pembeli dengan cara melakukan kolusi dengan pihak agen pengapalan (yang notabene ditunjuk oleh pembeli) atau didapatkan dengan cara mengikuti lelang tersebut. Sementara penjual hanya mempunyai kesempatan mengambil kembali barang tersebut dengan mengimpor barang tersebut, tetapi hal tersebut akan menambah kerugian pembeli karena kendala biaya pengiriman ke Indonesia, termasuk didalamnya pajak impor dan bea masuk.

Sistem pembayaran telegraphic transfer ini dapat merugikan pihak eksportir dan juga pihak importer. Pihak eksportir dirugikan apabila tidak dilakukannya pelunasan dari pihak importer dengan alasan yang sering terjadi adalah barang tidak sesuai pesanan. Sedangkan pihak importer dirugikan apabila pihak importer sudah memberikan uang muka tetapi barang tidak dikirim eksportir.

Sistem pembayaran telegraphic transfer ini banyak dipakai oleh eksportir dengan alasan karena adanya uang muka sebesar 20% – 30%.

Dalam system pembayaran melalui *telegraphic transfer* selalu diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Karena itulah hukum mengatur bagaimana apabila pembeli tidak melakukan pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak eksportir, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi PT. Sumatera Ocean Transindo).

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembayaran melalui *Telegraphic Transfer* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan?
2. Bagaimana pelaksanaan ekspor dengan menggunakan sistem pembayaran *Telegraphic Transfer* pada PT. Sumatera Ocean Transindo?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi importir dalam melakukan pembayaran melalui system *Telegraphic Transfer* pada PT. Sumatera Ocean Transindo?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang system pembayaran melalui *Telegraphic Transfer*
2. Untuk menganalisis pelaksanaan ekspor dengan menggunakan sistem pembayaran *Telegraphic Transfer* pada PT. Sumatera Ocean Transindo
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi importir dalam melakukan pembayaran melalui sistem *Telegraphic Transfer* pada PT. Sumatera Ocean Transindo
4. **Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian yang diperoleh dari penulisan tesis ini adalah sebagaiberikut:

1. SecaraTeoritis

Penulisan tesis ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri maupun pihak yang membutuhkan sebagai kajian lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer*.

1. Secara Praktis

Penulisan tesis ini diharapakan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer (Studi* PT. Sumatera Ocean Transindo).

1. **Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran pada kepustakaan di lingkungan Universitas Dharmawangsa, khususnya di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Dharmawangsa, belum ada penulisan yang membahas dan melakukan penelitian dengan judul *“*Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer”* akan tetapi penelitian menyangkut Telegraphic Transfer ini pernah ada dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Tesis saudara Ali Riza, NPM 13912091, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2016, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer*”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui *Telegraphic Transfer*?
3. Bagaimana penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak importir?
4. Penerapan Letter of Credit dan Telegraphic Transfer Sebagai Bentuk Metode Penyelesaian Pembayaran Internasional pada CV. Herdhea Batik Di Surakarta
5. Bagaimana proses mekanisme pembayaran dengan Letter of Credit dan Telegraphic Transfer pada CV. Herdhea Batik?
6. Apakah kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan Letter of Credit dan Telegraphic Transfer dalam transaksi perdagangan ekspor pada CV. Herdhea Batik?

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Perbedaannya dapat dilihat pada masalah utama yang akan di bahas Sehinggga penelitian ini, asli adanya serta dapat dipertnggunngjawabkan keasliannya.

1. **Kerangka Teori dan Konsepsi**
2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.[[5]](#footnote-5)

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses itu terjadi,[[6]](#footnote-6) dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenarannya. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, dari berbagai aspek perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis.[[7]](#footnote-7) Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan system pemikiran para ahli hukum sendiri.[[8]](#footnote-8)

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis di bidang hukum.[[9]](#footnote-9) Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara – cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil – hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.[[10]](#footnote-10)

Soejono Sukanto menyebutkan, adanya asumsi yang menyatakan bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, beberapa diantaranya yaitu:[[11]](#footnote-11) pertama, teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; kedua, teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta memperkembangkan defenisi-defenisi; dan ketiga, teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Kerangka teori yang digunakan dalam menelaah dan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori tanggung jawab.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah ssuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dalam arti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.[[12]](#footnote-12) Munir Fuady memberikan depinisi lebih luas bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.[[13]](#footnote-13)

Perjanjian merupakan sumber penting dalam melahirkan perikatan, prestasi atau kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak harus segera dipenuhi namun apabila prestasi itu secara sengaja atau lalai tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat menuntut ganti rugi atas semua kerugian yang telah dialaminya. Adapun yang dinamakan suatu prestasi adalah:[[14]](#footnote-14)

1. Menyerahkan suatu barang,
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Di dalam hokum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kemesusilaan.[[15]](#footnote-15) Adanya kebebasan inilah mengapa timbul banyak nama-nama perjanjian baru yang tidak dikenal di dalam KUHPerdata maupun KUHDagang. Dapat disimpulakan asas kebebasan berkontrak akan memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk:[[16]](#footnote-16)

1. Mermbuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,
4. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis ataupun lisan

Asas yang kedua adalah asas konsensualisme, asas ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang juga termasuk salah satu syarat sahnya dalam perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Unsur terplenting dalam suatu perjanjian yaitu subjek hukum, didalam membuat suatu perjanjian haruslah adanya persesuaian kehendakmyang dibuat oleh kedua belah pihak baik secara tertulis ataupun lisan.

Asas ketiga adalah asas kepastian hukum, asas ini dapat diistilahkan sebagai asas perjanjian yang berlaku sebagai undang – undang. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak maka isi yang telah dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak harus diikuti dan dilaksanakan, dan apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhinya maka sanksi atau bentuk penyelesaian sengketa yang timbul dapat diselesaikan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas keempat adalah asas itikad baik, pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, itikad baik ada 2 (dua) yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Bapak A melakukan perjanjian jual beli pupuk organik dengan Bapak B, Bapak A ingin memakai pupuk merek gajah namun di pasaran habis maka diganti merek semut oleh Bapak B dengan kualitas yang sama dengan merek gajah
2. Bersifat subyektif, artinya ketentuan sikap batin seseorang. Contoh, Ibu Budi ingin membeli motor, kemudian datanglah Bapak Paijo yang mau menjual motor tanpa surat-surat yang tidak lengkap dan dengan harga sangat murah. Ibu Budi tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang illegal.

Perjanjian juga memiliki unsur-unsur yang dapat dikatagorikan sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

1. Essentialia adalah unsur dari pada persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada,
2. Naturalia adalah unsur yang oleh undang – undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur,
3. Accidentalia adalah unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang – undang tidak mengaturnya.

Pada bentuk lain, perjanjian memiliki beberapa unsur dalam realitasnya yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Ada beberapa pihak

Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian, subyek perjanjian dapat berupa oranng atau badan hokum, subyek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hokum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

1. Ada plersetujuan antara para pihak

Persetujuan para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian itu timbul perjanjian.

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

1. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak – pihak sesuai dengan syarat – syarat perjanjian.

1. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang – undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

1. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat – syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban masing – masing pihak, syarat itu terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan kmewajiban dan menimbulkan hak.

Dalam hal Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan system pembayaran *Telegraphic Transfer* terjadi dikarenakan adanya penjanjian terlebih dahulu yang dilakukan oleh penjual dan pembeliyang melibatkan dua Negara yang berbeda. sebelumnya dilakukan perjanjian jual beli yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari eksportir sebagai penjual dan pihak importir sebagai pembeli. Maka sehubungan dengan adanya perjanjian jual beli (*Sale’s Contract)* yang berlangsung antara eksportir dan importir disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian jual beli tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian jual beli tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli (*Sale’s Contract), t*eori perjanjian akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji sistem pembayaran melalui *Telegraphic Transfer* dapat dilakukan sesuai dengan peraturan*.*

1. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka Negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasakan kekuasaan belaka.[[20]](#footnote-20) Dengan demikian Negara menjamin hak-hak hukum warga Negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum tersebut akan menjadi hak bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[[21]](#footnote-21) Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya, kekuasaan yang demikian inilah yang disebut sebagai hak, tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat biasa di sebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[[22]](#footnote-22)

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengnan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[[23]](#footnote-23)

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi Subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

1. Perlindungan Hukum Represif

Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu Liability dan Responsibility. Liability merupakan istlah hukum yang luas yang merujuk hamper semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban ssecara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.[[25]](#footnote-25) Responsibility berarti hak yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, Keterampilan, Kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.[[26]](#footnote-26)

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab seseorang secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dengan kata lain orang tersebut memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.[[27]](#footnote-27)

Teori tanggung jawab diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum bagi importir dalam melakukan pembayaran melalui system *Telegraphic Transfer* pada PT. Sumatera Ocean Transindo

1. **Kerangka Konsepsi**

Konsepsi dapat diartikan sebagai upaya dalam membentuk batasan tentang sesuatu yang akan dikerjakan, dengan kata lain konsepsi merupakan awal atau pintu utama dari sebuah penelitian. Konsepsi bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian ataupun penafsiran (multi tafsir) dari istilah istilah yang akan dipakai dalam penulisan tesis dan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kerangka konsepsi dari penelitian ini adalah:

1. “Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum, hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.[[28]](#footnote-28)
2. Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menmyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”.[[29]](#footnote-29)
3. Perjanjian Jual Beli (*Sale’s Contract)* adalah kesepakatan antara antara kedua belah pihak (eksportir dengan importer) yang akan melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama dan masing-masing pihak mengikat diri untuk melaksanakan semua hak dan kewajibannya yang timbul.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. [[30]](#footnote-30)
5. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor[[31]](#footnote-31)
6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.[[32]](#footnote-32)
7. Ekpor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.[[33]](#footnote-33)
8. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.[[34]](#footnote-34)
9. *Telegraphic Transfer* (T/T) adalah salah satu metode pembayaran yang digunakan  pada sistem Advance Payment (pembayaran di awal) melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana yang dilakukan antar negara.
10. **Metode Penelitian**

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pencarian data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran dalam penelitian.[[35]](#footnote-35)

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian.[[36]](#footnote-36) Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[[37]](#footnote-37)

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seseorang maupun lembaga pendidikan dikatan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut, penelitian secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang *actual* mengenai perkembangan ilmu tersebut.[[38]](#footnote-38)

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.[[39]](#footnote-39) Jadi, penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi, untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut masalahnya dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.Tanpa adanya metode dan teknik penelitian, maka hasil penelitian itu diragukan kebenarannya. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[[40]](#footnote-40) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[[41]](#footnote-41) Penelitian ini juga berarti suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[42]](#footnote-42)

* 1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta dan keadaan ataupun gejala yang tampak bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi PT. Sumatera Ocean Transindo), dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[[43]](#footnote-43)

## Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

* 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[[44]](#footnote-44) Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Direktur PT. Sumatera Ocean Transindo.
  2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, kamus, dan data lain, yang terbagi atas :
     1. Bahan hukum primer merupakan norma kaidah dasar ataupun bahan- bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.[[45]](#footnote-45) Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2022
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang pembayaran transaksi impor
   * 1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[[46]](#footnote-46) Terkait dengan tesis ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, serta karangan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.
     2. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.[[47]](#footnote-47)
7. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

1. Studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.[[48]](#footnote-48)
2. Pedoman wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Direktus PT. Sumatera Ocean Transindo.

## Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (implementasikan). Semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian, disusun dan dianalisis secara deskriptif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam menganalisis data dapat memakai pedoman-pedoman yang ada, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian disimpulkan.[[49]](#footnote-49)

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan penelitian melalui *website* (situs internet), selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder melalui penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara/interview dengan narasumber dan mengumpulkan data berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, dimana analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.[[50]](#footnote-50)

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik ke hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.[[51]](#footnote-51)

**BAB II**

**PENGATURAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO**

1. **Dasar Berlakunya Sistem Pembayaran melalui Telegraphic Transfer pada PT. Sumatera Ocean Transindo.**
2. Perjanjian Jual – Beli (Sales Contract)

Perjanjian dikenal dengan beragam istilah. Perjanjian merupakan padanan dari istilah “*overeenkomst”* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.[[52]](#footnote-52) Uthrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian*,* sedangkan Achmad Ichsan memakai istilah *verbintenis*.[[53]](#footnote-53)Pasal 1313 KUHPerdata mendefenisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman dan Abdul Kadir Muhammad, defenisi tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.[[54]](#footnote-54)

26

Menurut Abdul Kadir Muhammad kelemahan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri“ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara pihak-pihak.

1. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus.*

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*, seharusnya digunakan kata persetujuan

1. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

1. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian.

Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.[[55]](#footnote-55)

Berdasarkan alasan yang dikemukan di atas, maka perlu dirumuskan kembali yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu dan jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.[[56]](#footnote-56)

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas,telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.[[57]](#footnote-57)

Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[58]](#footnote-58) Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.[[59]](#footnote-59)

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[[60]](#footnote-60)

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui beberapa hal mengenai perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian dilakukan antara sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan merupakan subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.[[61]](#footnote-61)

b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.[[62]](#footnote-62)Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa pihak tersebut telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud merupakan kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.[[63]](#footnote-63)

e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.[[64]](#footnote-64)

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.[[65]](#footnote-65)

1. Asas Hukum Perjanjian Jual – Beli *(Sales Contract)*

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.[[66]](#footnote-66)Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.[[67]](#footnote-67)Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.[[68]](#footnote-68)

Selanjutnya Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.[[69]](#footnote-69)

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.[[70]](#footnote-70)Asas hukum (*principle)* adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah :

“bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrittersebut.”[[71]](#footnote-71)

Dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas hukum perjanjian, yaitu antara lain:

* 1. Asas Kebebasan Berkontrak atau *Open System*

Asas yang utama di dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat. Asas ini biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*.[[72]](#footnote-72)

Sistem terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerdata tentang Perjanjian berbeda dengan Buku II KUHPerdata tentang Benda yang menganut sistem tertutup (*closed system)*. Sistem tertutup dimaksudkan bahwa di dalam hukum benda aturan yang dianut adalah terbatas dan peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa.[[73]](#footnote-73)

* 1. Asas Konsensualisme

Asas yang juga perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian adalah asas konsensual atau *contract vrijheid*.[[74]](#footnote-74) Asas konsensualisme dipahami bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian, dengan ketentuan yang harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam berbagai macam perjanjian. Asas konsensual tercermin sebagai contoh dalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa, “jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Para pihak diberikan kebebasan membuat kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri atau konsensus tersebut, secara tertulis atau tidak, bahkan suatu perjanjian bisa tercapai secara verbal atau hanya secara lisan saja. Asas konsensualisme menganut paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat. Dalam negara yang menganut *common lawsystem* diketahui bahwa *“offer and acceptance go together to create mutual assent” or “a meeting of the minds”,* yang berarti bahwa kedua belah pihak mengetahui persyaratan-persyaratan dan secara bebas para pihak setuju diikat oleh ketentuan dan persyaratan tersebut.[[75]](#footnote-75)

* 1. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik dimaksudkan bahwa perjanjian dilaksanakan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut Pitlo dalam buku Purwahid Patrik, bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu.[[76]](#footnote-76)

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian obyektif dipahami sebagai bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

* 1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata terutama dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” tersebut mengandung arti bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Pihak yang satu tidak dapat melepaskan diri secara sepihak dari pihak lain, dimana pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa *Pacta Sunt Servanda* ini merupakan asas kepastian hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdata yang menentukan bahwa, “persetujuan – persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

* 1. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak mempengaruhi pihak ketiga, kecuali yang telah datur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.[[77]](#footnote-77) Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menentukan,”pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Jual – Beli *(Sale’s Contrac)*

Keabsahan suatu perjanjian diperoleh jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagaimana akan diuraikan berikut :

1. Sepakat (*Toestemming)* Mereka yang Mengikatkan Dirinya ;

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai hal yang dikehendaki untuk dilaksanakan, cara dan kapan harus dilaksanakan serta siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum suatu perjanjian dibuat, biasanya salah satu pihak terlebih dahulu melakukan suatu bentuk penawaran mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada lawan pihaknya. Isi dari penawaran tersebut adalah kehendak salah satu pihak yang disampaikan kepada lawan pihaknya guna disetujui oleh lawan pihak tersebut. Apabila pihak lawan menerima penawaran itu, maka tercapailah kata sepakat antara para pihak tersebut.

Dalam hal pihak lawan tidak menyetujui penawaran tersebut, maka pihak yang mengajukan penawaran tadi dapat mengajukan penawaran lagi yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi atau yang sesuai dengan kehendaknya yang dapat dilaksanakan dan diterima olehnya.

Menurut perjanjian konsensuil kesepakatan terjadi pada saat diterimanya penawaran terakhir yang diajukan. KUHPerdata menyatakan bahwa dalam perjanjian konsensuil dengan adanya kesepakatan maka lahirlah perjanjian yang pada saat bersamaan juga melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Dengan lahirnya perikatan tersebut maka menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur. Pasal 1236 KUH-Perdata menegaskan bahwa debitur wajib memberi penggantian berupa biaya, ganti rugi dan bunga dalam hal debitur itu tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Lahirnya kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau tidak dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan.[[78]](#footnote-78)

1) Paksaan (*Dwang*)

Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yakni dengan menggunakan cara melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan milik pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana yang legal maupun illegal. Contoh sarana yang ilegal adalah mengancam dengan pisau, sedangkan contoh sarana yang “legal’’ adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit.[[79]](#footnote-79)

2) Kesesatan (*Dwaling*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi risiko pihak yang membuatnya.[[80]](#footnote-80)

3) Penipuan (*Bedrog*)

Yang dimaksud dengan penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan mengunakan tipu daya lainnya. Terdapat hubungan yang erat di antara kekeliruan dan penipuan. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu.[[81]](#footnote-81)

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Disamping kesepakatan para pihak, juga ada syarat subyektif lainnya yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan seseorang menurut Pasal 330 KUHPerdata yaitu telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian orang-orang yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pernikahannya tersebut putus maka orang itu tidak akan kembali ke dalam keadaan belum dewasa. Seseorang yang pernah menikah meskipun usianya belum genap 21 tahun tetap dianggap sebagai orang dewasa.

Dengan dewasanya seseorang maka orang tersebut dianggap cakap (*bekwaam, capable*) untuk melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian, membuat wasiat, menikah dan lain-lain. Cakap disini menurut hukum seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik untuk dan atas namanya sendiri yang berkaitan dengan kecakapanya bertindak dalam hukum, kewenangan bertindak selaku kuasa dari orang lain, yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI KUH Perdata dan kewenangan bertindak sebagai wali dari pihak lain.

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa, “setiap orang adalah cakap (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Kecakapan bertindak merujuk pada kewenangan yang umum, kewenangan umum untuk menutup perjanjian lebih luas lagi, untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, sedangkan kewenangan bertindak menunjuk kepada yang khusus, kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang khusus.[[82]](#footnote-82)

Kewenangan hanya menghalang-halangi untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Orang yang dinyatakan tidak cakap adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak cakap, sedang orang yang tak cakap adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, atau dengan kata lain tidak cakap menutup perjanjian tertentu (secara sah).[[83]](#footnote-83)

Dengan demikian, kata “kewenangan” dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang tertuju kepada kewenangan umum, harus dibaca “kecakapan”sedangkan Pasal 1330 sub 3, kata “kecakapan bertindak” yang tertuju kepada kewenangan khusus harus dibaca “kewenangan bertindak”.

Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan para pihak yang tidak cakap, yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang telah diundangkan, mengakibatkan istri menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum perjanjian.

Ketidakcakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam syarat subyektif perjanjian. Hal ini disebabkan kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Akibat hukum yang terjadi dengan dilanggarnya syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Sehingga jika para pihak yang tidak keberatan dengan pelanggaran syarat subyektif ini dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah.

1. Suatu hal tertentu

Kepastian hukum dalam perjanjian ada, jika setiap perjanjian mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Ketegasan obyek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa obyek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menentukan bahwa, “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Rumusan Pasal 1333 KUH Perdata tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis perjanjian pasti melibatkan keberadaan dari suatu kebendaan tertentu. Pada perikatan untuk memberikan sesuatu, maka benda yang diserahkan tersebut harus dapat ditentukan secara pasti. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu dalam pandangan KUHPerdata, hal yang wajib dilakukan oleh satu pihak dalam perikatan tersebut (debitor) berhubungan juga dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan berwujud.[[84]](#footnote-84) Dalam perikatan untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, KUHPerdata juga menegaskan kembali bahwa apapun yang ditentukan untuk tidak dilakukan atau tidak diperbuat, pasti merupakan kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang pasti harus telah dapat ditentukan pada saat perjanjian dibuat.[[85]](#footnote-85) Dengan demikian menurut KUH Perdata, kebendaan yang dapat dijadikan obyek dari perjanjian adalah telah ditentukan jenisnya.

Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa, “hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.” Benda yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda-benda yang dapat diperdagangkan atau kebendaan yang masuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Benda-benda yang berada di luar lapangan hukum harta kekayaan sebagaimana diatur pada Buku II KUH Perdata tentang Kebendaan, tidak dapat menjadi pokok perjanjian.

Hal tersebut disebabkan benda-benda itu tidak termasuk dalam rumusan Pasal 1131 KUH-Perdata, oleh karena itu tidak dapat dijadikan jaminan pelunasan suatu perikatan. Selanjutnya Pasal 1334 KUH Perdata menegaskan bahwa hanya seseorang yang dapat berbuat bebas dengan kebendaan yang menjadi pokok perjanjian saja yang dapat membuat perjanjian yang mengikat kebendaan tersebut.[[86]](#footnote-86)

1. Suatu sebab yang halal

Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal alasan suatu perjanjian itu dibuat. Ketentuan sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 sampai pada Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwa, “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata hanya menentukan bahwa yang termasuk sebab yang halal adalah :

1). bukan tanpa sebab;

2). bukan sebab yang palsu

3). bukan sebab yang terlarang.

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Sebab halal yang dimaksud adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 1337 KUH Perdata. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang dimaksudadalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.[[87]](#footnote-87)

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini agar perjanjian itu menjadi suatu perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.[[88]](#footnote-88)

Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat syarat subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan, jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subyektif, maupun batal demi hukum dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif.[[89]](#footnote-89)

1. Lahir dan Berakhirnya Sutau Perjanjian Jual – Beli *(Sale’ Contrac)*

Penetapan kapan saat lahirnya suatu perjanjian mempunyai arti penting bagi kesempatan penarikan kembali penawaran, penentuan resiko, saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa suatu perjanjian, serta menentukan tempat terjadinya perjanjian. Setiawan menguraikan beberapa teori atau ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum mengenai kapan suatu perjanjian dianggap lahir, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika seseorang mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka orang itu tidak terikat kepada pernyataan tersebut.

1. Teori Pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa setiap orang dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

1. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*)

Teori yang sekarang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, di mana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

1. Teori Ucapan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat berubah.

1. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. Diterangkan selanjutnya bahwa dengan dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut sehingga saat pengiriman dapat ditentukan secara tepat.

1. Teori Pengetahuan (*Vernemeningstheorie*)

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Kelemahan teori ini adalah sulit untuk menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.

1. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan-penawaran oleh orang yang menawarkan.[[90]](#footnote-90)

Menurut Munir Fuady, terdapat teori lainnya mengenai saat lahirnya perjanjian, yaitu :

1. Teori penawaran dan penerimaan (*Offer and Acceptance*)
2. Teori penawaran dan penerimaan adalah bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.
3. Teori Kotak Pos (*Mailbox Theory*)

Menurut teori ini, suatu penerimaan tawaran dari suatu perjanjian sehingga perjanjian dianggap mulai terjadi adalah pada saat jawaban yang berisikan penerimaan tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos (mailbox). Pemikiran di belakang teori ini adalah bahwa perjanjian efektif setelah pihak yang ditawari perjanjian sudah menerimanya dan sudah terlepas dari kekuasaanya, yakni ketika pihak tersebut membalas surat penawaran dan memasukkannya ke dalam kotak surat.

1. Teori Dugaan

Teori dugaan yang bersifat subjektif dianut oleh Pitlo. Menurut teori ini, saat terjadinya suatu perjanjian adalah pada saat pihak yang menerima tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut dapat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan) telah mengetahui isi surat itu.[[91]](#footnote-91)

Hapusnya suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Pada Pasal 1381 KUH Perdata tersebut mengatur cara hapusnya suatu, dengan tidak membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan hapus karena:

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. pembaharuan utang;
4. perjumpaan utang atau kompensasi;
5. pencampuran utang;
6. pembebasan utangnya;
7. musnahnya barang yang terutang;
8. kebatalan atau pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal ;
10. liwatnya waktu

Menurut Salim HS adapun cara-cara penghapusan perjanjian antara lain sebagai berikut :

1. Karena pembayaran (*betaling*)
2. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan (*konsignasi*).
3. Karena pembaharuan hutang *(novasi, schuld verniewing)*
4. Karena kompensasi atau perjumpaan utang
5. Karena konfusi atau percampuran antara utang dan pinjaman
6. Karena pembebasan utang
7. Karena pernyataan tidak sah atau terhapus
8. Karena daluarsa atau *verjaring*

Menurut Setiawan, adapun beberapa cara hapusnya perjanjian adalah :

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, misalnya penyewa yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa yang akan berakhir selama 3 tahun.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya, menurut Pasal 1066 ayat 3 KUHPerdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan dengan pembatasan berlakunya perjanjian hanya untuk lima tahun, sebagaimana diatur Pasal 1066 ayat 4 KUHPerdata.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Misalnya, jika salah satu pihak dalam perjanjian perseroan meninggal, maka perjanjian menjadi hapus (Pasal 1646 ayat 4 KUHPerdata).
4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*). Hal ini dapat dilakukan baik oleh salah satu atau dua belah pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya, perjanjian kerja dan perjanjian sewa-menyewa.
5. Tujuan perjanjian telah tercapai, misalnya dalam perjanjian jual beli bila salah satu pihak telah mendapat uang dan pihak lain telah mendapatkan barang maka perjanjian akan berakhir.
6. Perjanjian hapus karena putusan hakim
7. Perjanjian hapus karena perjanjian para pihak.Hapusnya perjanjian disebabkan oleh karena, para pihak masing-masing setuju untuk saling menghentikan perjanjiannya, misalnya perjanjian pinjam pakai berakhir karena pihak yang meminjam telah mengembalikan barangnya.
8. Larangan Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Jual – Beli *(Sale’ Contrac)*

Menurut Purwahid Patrik, penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti misalnya keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain tersebut seharusnya dicegah.[[92]](#footnote-92)Penyalahgunaan keadaan seperti ini dapat terjadi bila suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan dari salah satu pihak, baik itu keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi, keunggulan jabatan, maupun keunggulan-keunggulan lainnya.

Penyalahgunaan keadaan dibagi atas 2 (dua) jenis :

* 1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi / *economische overwicht* dari satu pihak terhadap pihak lain.
  2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi / *geestelijke overwicht* dari satu pihak terhadap pihak lain.[[93]](#footnote-93)

Jenis penyalahgunaan keadaan tersebutyang disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan hakim daripada penyalahgunaan keadaan yang disebabkan oleh adanya keunggulan psikologis.Kemungkinan hal ini disebabkan karena sulitnya pembuktian terhadap adanya keunggulan psikologis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, jika dibandingkan dengan pembuktian terhadappenyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi.[[94]](#footnote-94)

Syarat utama penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi, terdiri dari :

1. Adanya ketergantungan secara psikologis dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dimanfaatkan / disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi.
2. Adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Pihak yang memiliki kesukaan secara psikologi terhadap pihak lain itulah yang lemah secara psikologi dalam proses pembuatan perjanjian.[[95]](#footnote-95)

Penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan psikologi ini dikarenakan adanya kesukaan secara psikologi yang luar biasa yang dimanfaatkan/disalahgunakan pihak lawan, sehingga pihak tersebut melakukan perbuatan hukum yang tidak bijaksana yang sebenarnya merugikan bagi dirinya. Contoh penyalahgunaan keadaan karena adanya keunggulan psikologi tentang adanya seseorang yang sangat fanatik terhadap suatu merek dari produk tertentu, yang tidak akan mau menggunakan produk sejenis dengan merek yang lain. Penjual dari produk dengan merek ini mengetahui bahwa calon pembelinya adalah seseorang yang sangat fanatik dengan merek produk yang dijualnya, dimanasi penjual ini adalah satu-satunya orang yang menjual produk itu. Penjual setelah mengetahui hal tersebutmenetapkan harga yang sangat tinggi dan membuat syarat-syarat yang amat menguntungkan bagi diri si penjual secara sepihak. Pembeli karena terdorong oleh rasa suka secara psikologi yang luar biasa tadi, akhirnya menyetujui harga dan semua syarat yang ditetapkan oleh penjual demi mendapatkan produk yang amat diinginkannya. Kesukaan secara psikologi yang luar biasa ini menyebabkan si pembeli tadi tidak dapat berpikir dan bertindak secara obyektif untuk memilih produk secara tepat, padahal jika dipikirkan secara obyektif maka sebenarnya tindakan tersebut amat merugikan dirinya. Perhitungan secara ekonomis dikalahkan oleh rasa suka yang amat sangat secara psikologis terhadap suatu produk dengan merek tertentu, sehingga walaupun merugikan tapi tetap dibelinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh si penjual yang mengetahui kelemahan psikologis dari calon pembelinya dengan menetapkan harga dan syarat-syarat yang amat menguntungkan bagi si penjual. Penyalahgunaan keadaan secara psikologis seperti ini dapat terjadi walaupun pihak pembeli adalah pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Jadi keunggulan secara psikologis dapat mengalahkan keunggulan secara ekonomis. Kasus yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi tersebut belum banyak diputuskan oleh hakim di Indonesia, walaupun secara mudah diasumsikan banyak terjadi di Indonesia namun belum ada yang diputuskan sebagai penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi syarat utama sebagai berikut:

* 1. Satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang ekonomi daripada pihak lainnya.
  2. Adanya keunggulan ekonomi dari salah satu pihak tersebut menyebabkan pihak yang lain terdesak untuk menyepakati perjanjian yang bersangkutan. Ada suatu keadaan terdesak dan tidak ada alternatif pilihan lain bagi pihak yang lemah secara ekonomi selain untuk menyepakati perjanjian tersebut. Keadaan ini juga menyebabkan pihak yang lemah secara ekonomi tidak memiliki daya tawar / *bargaining power* yang cukup untuk melakukan suatu perundingan yang *fair* mengenai isi dari perjanjian tersebut.[[96]](#footnote-96)

1. **Alasan Terjadinya Sale’s Contrac pada PT. Sumatera Ocean Transindo**
   * 1. Perbedaan ketentuan Peraturan dan letak Geografis

Peraturan-peraturan jual beli perdagangan berbeda untuk masing- masing negara, yaitu perbedaan-perbedaan ketentuan dalam pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Perkembangan pasar global menuntut kesiapan dan kemampuan pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama dalam mengatasi hambatan-hambatan transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perdagangan luar negeri khususnya dalam transaksi ekspor impor mengandung risiko tinggi. Sehingga para pihak yang terlibat di dalamnya dituntut mampu memahami keseluruhan proses dan bagian dari transaksi tersebut.

Perdagangan ekspor impor termasuk kegiatan yang mengandung risiko tinggi, karena eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor. Salah satu risiko yang dihadapi oleh eksportir adalah apabila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak. Risiko tersebut dapat dihindari apabila setiap transaksi ekspor yang dilakukan, dituangkan dalam bentuk tertulis atau ke dalam bentuk kontrak dagang (sales contract).

Siswanto Sutojo menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor yaitu:[[97]](#footnote-97)

* + 1. Antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) komoditas yang diperdagangkan dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan
    2. Terdapat perbedaan mata uang antara negara pembeli dan penjual.

Seringkali pembayaran transakasi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing misalnya dolar Amerika, pounsterling Inggris ataupun yen Jepang

* + 1. Adakalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama dan akrab. Pengetahuan masing-masing pihak yang bertransaksi tentang kualifikasi mitra dagang mereka termasuk kemampuan membayar atau kemampuan untuk memasok komoditas sesuai dengan kontrak penjualan sngat minim
    2. Seringkali terdapat perbedaan kebijaksanan pemerintah negara pembeli dan penjual dibidang perdagangan internasional, moneter lalu lintas devisa*, labeling*, embargo atau perpajakan.
    3. Antara pembeli dan penjual kadang-kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional serta bahasa asing yang secara populer dipergunakan dalam transaksi itu misalnya bahasa inggris.
    4. Menurut KUHPerdata dan KUHDagang

Ketentuan umum yang secara mutlak harus ditaati dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, ayat (1) dan (2) merupakan syarat subyektif, sedangkan untuk ayat (3) dan (4) merupakan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memiliki salah satu atau kedua syarat subyektif, perjanjian tersebut akan tetap berjalan tapi dapat dibatalkan oleh para pihak jika dikehendaki. Sedangkan jika perjanjian tersebut tidak memiliki salah satu atau kedua syarat obyektif, perjanjian tersebut kan batal demi hukum.

Jual beli secara umum diatur KUHPerdata, sedangkan jual beli perdagangan tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD, melainkan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak, dan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan. Sebagai ketentuan umum, KUHPerdata tetap berlaku terhadap jual beli perdagangan sepanjang tidak diperjanjikan secara khusus menyimpang.[[98]](#footnote-98)

Jual beli dalam arti khusus ialah jual beli perdagangan, dalam hal ini transaksi ekspor impor, dimana dalam jual beli ini terdapat ciri-ciri khusus pula. Kekhususan itu dapat ditelaah melalui unsur-unsur dalam jual beli berikut ini:

1. Unsur subyek terdiri dari penjual dan pembeli. Dua pihak ini atau salah satunya adalah pengusaha, yaitu perseorangan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan.
2. Unsur obyek terdiri dari benda dan harga. Benda adalah barang dagangan, yaitu barang yang dibeli atau dijual lagi atau disewakan. Harga adalah nilai benda sebagai imbalan yang dapat menghasilkan nilai lebih yang disebut keuntungan atau laba.
3. Unsur perbuatan terdiri dari menjual dengan penyerahan dan membeli dengan pembayaran harga. Penyerahan barang dengan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat khusus pula. Pembayaran biasanya dilakukan melalui Bank dengan menggunakan dokumen- dokumen berharga.
4. Unsur tujuan yaitu keuntungan atau laba yang diperhitungkan. Setiap transaksi ekspor impor selalu melewati atau melintasi daerah pabean tertentu. Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang, dan tidak sebaliknya.[[99]](#footnote-99)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa kawasan pabean adalah Kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan ekspor menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pada pelaksanaan perjanjian ekspor impor tahapannya adalah sebagai berikut:

* 1. Pra kontraktual atau tahap awal perjanjian. Dalam tahap ini terjadi penawaran produk yang diajukan oleh penjual (eksportir) biasanya disertai dengan harga barang, mutu barang, jumlah serta syarat-syarat lain yang biasanya disebut *an inquiry for a quotation*. Apabila penawaran tersebut disetujui oleh pembeli (importir), maka kedua belah pihak mengikatkan diri untuk melakukan “perjanjian jual beli”, dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
  2. Kontraktual atau tahap terjadinya perjanjian. Merupakan realisasi dari tahap awal perjanjian, yang kemudian dituangkan secara rinci dan tertulis tentang segala sesuatu yang dianggap penting dalam transaksi ekspor impor.
  3. Post kontraktual. Merupakan realisasi dari perjanjian yaitu pelaksanaan kontrak.[[100]](#footnote-100)

**BAB III**

**PELAKSANAAN EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO**

* + 1. **PT. Sumatera Ocean Transindo**
       1. Deskripsi PT. Sumatera Ocean Transindo

Pada awal pendirian, PT Sumatera Ocean Transindo mulanya merupakan Perseroan Komanditer CV.Sumatera Ocean Transindo yang bergerak di bidang impor ikan dimana perusahaan mengimpor bahan baku untuk dipindang dan dijadikan ikan kering, sedangkan para buruh mengerjakannya di pabrik. Para buruh pabrik, sebagian besar berasal atau bertempat tinggal di sekitar perusahaan. Adapun produksi utama perusahaan ini adalah hasil laut, Berkat keuletan, pengalaman, keahlian dan jiwa wiraswasta yang dimiliki oleh Bapak Hartono selama satu dasawarsa perusahaan ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan produk untuk ekspoSaat ini perusahaan mengalami kesulitan bahan baku yang disebabkan cuaca yang ekstrim. Sehingga perusahaan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Dengan alasan inilah perusahaan berupaya meningkatkan kualitas produk agar mendapat hasil yang maksimal.

Adanya keuletan, keahlian, pengalaman dan jiwa wiraswasta pimpinan perusahaan, dalam mengelola perusahaan sangat menunjang perkembangan perusahaan, dengan semakin berkembangnya perusahaan maka pada tahun 2015 , PT.Sumatera ocean Transindo beralih dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum dan memperoleh ijin resmi dari pemerintah (HO, SIUP, Ijin Industri), yang kemudian bernama PT.Sumatera Ocean Transindo .

55

Adapun lokasi PT. Sumatera Ocean Transindo di Jl. Jala IV No 34 Medan sebagai kantor pusat, berdasarkan akte pendiriannya PT. Sumatera Ocean Transindo bergerak dalam bidang: Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*coldstorage*), Perdagangan hasil-hasil laut, Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dan tidak melanggar ndang-undang yang berlaku.

Bidang usaha yang telah dijalankan selama ini adalah industri dan perdagangan hasil laut melalui kantor pusatnya di Medan, Direktur perusahaan untuk pertama kali saat berdirinya sampai sekarang belum berubah yaitu tetap Bapak Hartono. Adapun jenis perusahaan ini berbentuk PT tertutup.

Saham-saham yang dimiliki perusahaan ini tidak diperjual belikan kepada pihak luar. Tanggung jawab atas perusahaan ini dipegang oleh direksi,demikian juga susunan pimpinan pada waktu berdiri sampai sekarang tidak mengalami perubahan.

2. Struktur Organisasi PT Sumatera Ocean Transindo

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan antara pejabat maupun bidang kerja yang satu dengan yang lainnya sehingga akan tampak mengenai kepegawaiannya. Suatu Organisasi dalam upaya mencapai tujuan, mutlak memerlukan adanya struktur organisasi yang sesuai dengan aktivitas yang dijalankannya. Terlebih lagi suatu organisasi yang telah maju dan besar, struktur organisasi dapat berfungsi untuk memudahkan pimpinan dalam mengawasi aktivitas organisasi yang dipimpinnya.

Struktur organisasi yang baik dan teratur dapat membawa keuntungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dari struktur organisasi inilah dapat diketahui tentang kedudukan, tanggung jawab,wewenang,tugas dan kewajiban dari masing-masing personel. Dengan struktur organisasi yang baik akan diperoleh keterangan mengenai:

* 1. Besar kecilnya organisasi yang bersangkutan.
  2. Saluran perintah dan tanggung jawab masing-masing personel.
  3. Jabatan yang terdapat dalam organisasi beserta jabatannya.
  4. Perincian dan tugas-tugas dari masing-masingunit organisasi

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi PT. Sumatera Ocean Transindo adalah sebagai berikut:

* 1. Manajer, Bertugas mengelola fungsi manajemen agar berlangsung sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
  2. Spv. Pemasaran, bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemesanan produk/penjualan, bekerja sama dengan Merchandiser untuk mempromosikan produk.
  3. Spv. Produksi, , bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi, menjaga kualitas dan kuantitas hasil produksi.
  4. Spv. Gudang,bertugas dan bertanggung jawab dalam pengawasan barang yang masuk dari suplier, serta pengawasan terhadap kualitas produk.
  5. Spv. Persiapan Doc. Export, bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk barang yang akan diekspor.
  6. Spv. Pengembangan Produk, bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan produk, melekukan koordinasi antar manager/spv tentang pengembangan produk.
  7. Kont. Trans & Inc, bertanggung jawab terhadap penganalisaan keuangan perusahaan, pelaporan data keuangan dan pembukuan perusahaan.
  8. Keu & Umum, bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan perusahaan.
  9. Production, bertanggung jawab kepada supervisor produksi,membantu tugas-tugas supervisor produksi, dan melakukan koordinasi dengan Spv Produksi & Purchasing.
  10. Purschasing, bertanggung jawab kepada supervisor produksi,membantu tugas-tugas supervisor produksi tentang penerimaan dari luar dan pemesanan produk, dan melakukan koordinasi dengan Spv Produksi & asisten produksi.
  11. Doc & Leasom,membantu tugas-tugas supervisor Dokumen Ekspor, melakukan koordinasi dan bertanggung jawab terhadap data-data yang akan diarsip ataupun yang diperlukan dalam ekspor.
  12. Merchandiser, bertugas dan bertanggung jawab dalam penjualan,sehingga berhubungan dengan buyer di luar negeri.
  13. Bahan-bahan & Sample, melakukan koordinasi dan membantu tugas-tugas Spv Gudang dalam persiapan produksi dansample yang akan dikirimkan kepda buyer.
  14. Quality Control Bahan-bahan, melakukan koordinasi dan membantu tugas-tugas Spv Gudang dalam mengontrol kualitas bahan-bahan yang akan menjadi komponen produk serta membuat program untuk mengendalikan kualitas.
  15. Penerimaan Luar, bertugas dan bertanggung jawab dalam penerimaan setoran dari supplier kemudian setoran tersebut dicek agar didapat kesesuaian setoran yang dibutuhkan.
  16. Pengepakan & Pengiriman, bertugas untuk membungkus produk yang sudah jadi.
      1. **Dokumen Ekspor PT. Sumatera Ocean Transindo**

Setiap kegiatan ekspor di PT. Sumatera Ocean Transindo harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga Pengeluaran barang oleh importir di negara penerima, harus menyertakan dokumen ekspor dalam bentuk asli, bukan foto copy. Perdagangan luar negeri atau transaksi ekspor impor lazim disebut sebagai perdagangan dokumen karena hampir seluruh aktivitasnya dibuktikan atau dituangkan dalam bentuk dokumen, bukti pengiriman barang yang disebut Bill of Lading. Bagi eksportir, sistem dokumentasi mempunyai arti adanya hak untuk memperoleh imbalan, sehingga pelaksanaan penyerahan fisik barang dari eksportir kepada importer harus diiringi dengan penyerahan dokumen yang tepat dan telah disepakati.[[101]](#footnote-101)

Ketidak lengkapan dokumen pengiriman bisa menghambat pengeluaran barang dari wilayah pabean pengiriman maupun pemasukan di wilayah pabean memasukan barang, Dokumen yang standar dan umumunya berlaku ; [[102]](#footnote-102)

1. Faktur atau *Invoice*, yaitu dokumen dari penjual sebagai, lampiran B/L, yang berisi catatan barang-barang yang dikirim beserta harganya ditempat penjual. Ada dua macam Invoice, yaitu:
   * 1. Commercial Invoice, yaitu invoice yang dibuat oleh penjual, berisi perincian barang-barang yang dikirim beserta harganya.
     2. Consular Invoice, yaitu invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsul Dagang dari negara pembeli yang berdomisili di Negara penjual.
2. Packing List, yaitu suatu daftar barang yang dibuat dan ditandatangani oleh eksportir dengan menyebut perincian barangnya (pieces, peti, colli, karung atau ball), juga mencantumkan berat kotor dan berat bersih tergantung dengan jenis barangnya, tetapi tanpa mencantumkan harga, yang berfungsi untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai.
3. *Certificate of Origin* (COO), yaitu surat keterangan asal barang, yang dibuat di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang-barang yang bersangkutan. Di dalam sertifikat itu, dijelaskan bahwa barang tersebut benar-benar hasil produksi dari negara penandatangan sertifikat tersebut, sehingga secara tidak langsung sertifikat itu merupakan suatu jaminan atas kualitas barang tersebut. Ada dua macam *Certificate of Origin* (COO) , yaitu:
4. *Certificate of Origin* (COO) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yaitu berfungsi untuk mengurangi atau menghapus bea masuk dan untuk *release container* di negara importir.
5. *Certificate of Origin* (COO) yang diterbitkan kamar dagang dan industri (Kadin), yaitu tidak bisa digunakan untuk mengurangi bea masuk namun hanya bisa digunakan untuk *release container* di negara importir.
6. Konosemen (Bill of Lading). Dalam Pasal 506 KUHD dinyatakan bahwa konosemen (Bill of Lading) adalah surat bertanggal dalam mana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ; adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan diatas formulir atau media elektronik untuk disahkan di bea cukai yang berfungsi sebagai;
8. Sebagai pencatatan data ekspor;
9. Untuk difiatmuatkan oleh bea cukai supaya barang dapat dimuat diatas kapal;
10. Sebagai dasar perhitungan pajak.

6. Dokumen lainnya seperti ; sertifikat karantina untuk produk produk perikanan, pertanian, sertifikat asal kayu untuk produk produk furniture, dan sertifikat lainnya sesuai persayaratan yang ditentukan terhadap barang yang dikirimkan.

* + 1. **Prosedur Ekspor PT. Sumatera Ocean Transindo**

Prosedur ekspor yang harus dilaksanakan oleh PT. Sumatera Ocean Transindo dalam menyelesaikan suatu transaksi ekspor antara lain.[[103]](#footnote-103)

* + - 1. Eksportir menerima *order* (pesanan) dari *buyer* di luar negeri
      2. Eksportir menerima pembaran dimuka sebesar 20% dari buyer
      3. Eksportir menyiapkan bahan barang yang dipesan *buyer* dari Nelayan
      4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk di ekspor (sea-worthy packing)
      5. Eksportir memesan ruang kapal (booking) dan mengeluarkan shipping order pada maskapai pelayaran
      6. Eksportir menyelesaikn semua formulir eksportir dengan semua instansi ekspor yang berwenang
      7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal dengan atau tanpa menggunakan perusahaan ekspedisi

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran

9. Menyiapkan invoice dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya

10. Eksportir menerima sisa pembayaran dari buyer

11. Eksportir mengirimkan shipping-advice dan shipping document kepada importir

* + 1. **Metode Pembayaran PT. Sumatera Ocean Transindo**
       1. Letter Credit (L/C)

Letter Credit atau biasa disingkat L/C, Mekanisme kerja pembayaran dengan menggunakan L/C akan melibatkan sebuah bank, bank yang menerbitkan L/C akan memberikan jaminan bahwa importir akan melakukan pembayaran sesuai dengan persyaratan dan kesepakatan yang disetujui antara eksportir dan importir yang tertulis pada klausul Letter of Credit. Sebelum menerbitkan L/C untuk importir, pihak bank penerbit (issuing bank) akan melakukan analisis risiko, yang mirip dengan analisis saat menyalurkan kredit, kondite dan likuiditas importir menjadi pertimbangan. Kredibilitas bank penerbit sangat mempengaruhi, sehingga tidak semua bank dapat menerbitkan L/C yang bisa dipercaya. Nilai yang wajib dibayarkan oleh bank penerbit L/C harus disetorkan oleh pihak importir kepada bank. Bagi nasabah bank yang sudah lama menjalin hubungan dengan pihak Bank, kredibilitas dan kondite usaha sudah dinilai baik oleh pihak Bank, umumnya bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan terhadap penerbitan L/C dari pihak Bank. Pihak eksportir umumnya akan mempersyaratkan pihak importir dengan memberikan beberapa nama bank yang dianggap kredibel untuk menerbitkan L/C berdasarkan rekomendasi dari bank penerima (mewakili eksportir). Bank penerbit L/C sudah mempunyai hubungan kerja koresponden dengan bank penerima, sebagai jaminan bahwa bank tersebut tidak akan bermasalah pada saat L/C jatuh tempo pembayaran Ini untuk lebih meyakinkan agar tidak terjadi gagal bayar,. Umumnya pihak eksportir lebih menginginkan L/C diterbitkan oleh bank yang sudah besar, bank pemerintah, dan mempunyai kredibiltas yang tinggi. Biaya penerbitan L/C lebih mahal dibandingkan dengan metode pembayaran transfer. Metode ini sangat aman bagi eksportir, dan juga Eksportir bisa mendapatkan fasiltitas pembiayaan dari pihak bank penerima dengan meng-agun-kan L/C. Bagi Importir metode ini mengandung Risiko, apabila pesanan gagal dikirimkan oleh produsen, maka biaya proses dan penerbitan L/C sangat mahal, yang menjadi tanggungan Eksportir, Ada beberapa type Letter of Credit ;[[104]](#footnote-104)

1. Revocable dan Irevocable L/C

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh pembeli/ importir atau issuing bank tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada penjual/eksportir atas permintaan Applicant. L/C ini banyak digunakan dengan anak/cabang perusahaannya atau antara perusahaan yang sudah saling mempercayai. Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dan issuing bank menjamin akan membayarnya asal saja si eksportir menyerahkan dokumen yang cocok dengan L/C dan diserahkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam L/C.

1. Banker’s L/C

Banker’s L/C adalah L/C yang dibuka oleh suatu bank atas permintaan importir dan bank tersebut bertanggung jawab atas pembayaran L/C apabila semua syarat-syarat dalam L/C dipenuhi. Dengan kata lain Bank mengambil alih seluruh kewajiban membayar sehingga terjadi substitusi dari kemampuan melunasi oleh Opening Bank.

1. Confirmed L/C

Sifat khusus suatu Banker’s L/C adalah credit standing bank dan importir dalam L/C tersebut. Hal ini bisa di ajukan olah eksportir jika Bank pembuka tidak mempunyai reputasi Internasional dan situasi politik ekonomi yang mengharuskan demikian, sehingga eksportir memandang perlu untuk meminta jaminan kepada advising bank/ Negotiating bank. Dan ekspotir mengajukan agar dibukakan suatu Confirmed L/C atau lengkapnya disebut Confirming irrevocable L/C yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan dijamin sepenuhnya oleh confirming bank.

1. Commercial L/C

Commmercial letter of credit adalah L/C yang dibuka oleh bank atas permintaan nasabahnya, tetapi dikirimkan langsung kepada Beneficiary tidak melaluio Advising Bank. Commercial L/C ini dimaksudkan agar eksportir bisa dengan cepat menerima L/C dan bisa menegosiasikan weselnya pada beberapa bank (tidak terbatas pada satu bank) dengan jalan menyerahkan dokumen dan Commercial L/C yang asli. Dan Bank yang membayar wesel akan mencatat pada commercial L/C asli jumlah pembayaran yang telah dilakukan.

Secara khusus Letter of Credit dapat dibedakan sebagai berikut :[[105]](#footnote-105)

1. Red Clause L/C

Red Clause L/C adalah L/C dimana issuing banknya memberikan kuasa kepada paying bank unutuk membayar uang muka kepada Beneficiary sebagian dari jumlah L/C sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Artinya L/C ini memiliki klausul dengan tinta merah yang menyatakan bahwa advising/confirming bank dapat melakukan pembayaran di muka kepada eksportir/penjual/beneficiary sebelum penyerahan dokumen pengiriman barang dilakukan. L/C semacam ini sering digunakan untuk menyediakan dana/kredit bagi eksportir sebelum barang dikapalkan. Dan beneficiary harus membuat pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang diminta dalam L/C akan diserahkan pada waktunya.

1. Green-Ink L/C

L/C ini hampir sama dengan red-clause L/C yang memberikan pembayaran di muka dengan syarat eksportir harus menyerahkan kepada advising/ negotiating bank yang ditunjuk suatu bukti atau tanda terima penyimpanan barang dari warehouse sampai beneficiary siap untuk mengapalkan barang tersebut.

1. Revolving L/C

Pada L/C jenis ini, nilainya dapat diperbaharui sesuai dengan nilai yang tercantum didalamnya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan misalnya tentang nilai maksimum, kumulatif atau non-kumulatif dan dapat dipakai berulang-ulang. Dalam kontrak jual beli ditetapkan seluruh total nominal dan pengiriman barang serta L/C disesuaikan secara bertahap.

1. Transferable L/C

Pada L/C ini, beneficiary/ eksportir dapat dipindah tangankan berdasarkan instruksi khusus dari applicant atau importir/pembeli dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut artinya beneficiary diberi wewenang untuk menyerahkan pelaksanaan ekspornya kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya.

1. Back to back L/C

Suatu kemungkinan lain dari Transferable L/C adalah Back to Back L/C, jika beneficiary meminta kepada Applicant agar L/C yang dibukanya bersifat transferable. Jadi Applicant mengetahui bahwa beneficiary itu bukanlah eksportir yang sebenarnya dari barang yang dipesan. Eksportir yang sebenarnya adalah pihak ketiga (namanya biasa dirahasiakan, bisa menjual dengan harga lebih murah). Setelah Beneficiary menerima L/C, Si beneficiary meminta kepada advising bank supaya membuka L/C baru kepada pihak ketiga yang merupakan eksportir sebenarnya. Dan L/C kedua ini mengandung syarat- syarat yang sama seperti L/C yang pertama.

1. Stand by L/C

Jenis L/C ini merupakan L/C yang diberikan issuing bank atas permintaan applicant (kontraktor, debitor) sebagai jaminan khusus yang menyangkut fungsi financial kepada pihak beneficiary dan dipakai standby oleh beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Beneficiary credit ini dapat bertindak apabila si applicant gagal untuk memenuhi atau melaksanakan kontraknya, atau membayar kewajiban hutangnya (wanprestasi/ cedera janji terhadap beneficiary). Maka pihak bank akan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada beneficiary.

1. Restricted L/C

Jenis L/C ini merupakan L/C yang pembayarannya dibatasi (restricted) hanya kepada /melalui bank di negara beneficiary yang namanya tercantum pada L/C tersebut h. Sight L/C Sight letter of credit adalah L/C yang cara pembayarannya oleh negotiating bank dilakukan pada saat wesel-wesel ditunjukan oleh beneficiary disertai dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C. Pada umumnya Sight L/C ditujukan secara khusus kepada bank-bank koresponden diluar negeri di mana bank pembuka L/C mempunyai rekening dan bank penerima L/C sekaligus juga bertindak sebagai paying bank.

1. Usance L/C

Usance L/C ini pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo wesel berjangka (usance draft) dengan kata lain merupakan pemberian kredit oleh eksportir kepada importir untuk jangka waktu antara 90 hingga 180 hari dengan menerbitkan time/draft/ wesel. Pemberian fasilitas kredit ekspor dimaksudkan untuk mendorong pemasaran produk ke pasar ekspor. Bila eksportir memerlukan dana dapat mencairkan draft/weselnya dengan mendiskonto pada bank.

1. Merchant L/C

Merchant L/C dibuka oleh importir (bukan oleh bank), bisa dikirim kepada beneficiary langsung lewat perantaraan banknya yang untuk menjamin pembayaran draft pada saat jatuh tempo, tetapi bank tidak bertanggungjawab atas pembayaran L/C tersebut.

* + - 1. Non Letter Credit

Dalam transaksi perdagangan internasional yang dilakukan antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang.[[106]](#footnote-106) Di sisi lain importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Karena eksportir dan importir terpisah secara geopolitik dan geografis maka penyelesaian pembayaran memilki karakteristik sendiri. Hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan berbeda dan mereka terikat hukum dan peraturan negaranya masing-masing. Pembayaran kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan cara yaitu:[[107]](#footnote-107)

1. Advance Payment (Pembayaran dimuka)

Dalam sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka (pay in advance) kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Hal ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya. Oleh karena itu, dengan pembayaran dimuka maka eksportir mempunyai baik barang-barang mapun uang.

Pembayaran dimuka adalah lazim dalam saat kondisi pasar yang baik bagi penjual (seller's market). Besarnya pembayaran dimuka tersebut, lazimnya 100% dari barang yang diekspor. Pembayaran tersebut dilakukan dengan berbagai cara, yakni:

* + 1. Dengan cek (barang-barang akan dikirim setelah cek tersebut selesai di clearing).Dengan Banker's Draft (wesel yang ditarik oleh seorang eksportir atas bank importir. Bilamana bank mengaksepnya maka bill tersebut menjadi bank/banker's acceptance).
    2. Dengan Mail Payment Order (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui pos surat).
    3. Dengan Cable Payment Order (barang-barang akan dikirim setelah ada perintah pembayaran melalui kawat seperti telegrap).
    4. Dengan International Money Order (barang-barang akan dikirim setelah adanya perintah internasional yang lazim diikuti).

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembelian ini importir menanggung segala risiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimkannya barang-barang yang dipesan. Jaminan apakah yang akan didapatkan oleh importir untuk memastikan bahwa ia akan menerima barang-barang yang pembayarannya telah dilakukannya? Hanya pengetahuan terlebih dahulu dari integritas dan kekuatan keuangan eksportir yang bersangkutam, stabilitas ekonomi, dan politik dari negara penjual dan informasi kredit tentang bonafiditas/reputasi penjual (status report) yang dapat diperoleh. Dan lazimnya antara eksportir dan importir tersebut telah terjalin kepercayaan yang erat.

1. Open Account (Pembayaran kemudian)

Sistem pembayaran ini adalah kebalikan dari sistem Advance Payment. Dalam hal ini yang menanggung resiko adalah eksportir sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penanggulangan pembayaran adalah importir. Disebutkan Open Account (perhitungan kemudian) karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang disepakati. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir, dan tidak akan ada dikirimkan wesel atau instrumen lain oleh eksportir kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan atau waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran dan pemberian discount harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelem jatuh tempo. Jadi transaksi ini merupakan transaksi langsung antara eksportir dan importir. Open Account terjadi apabila:

* + - 1. Ada kepercayan penuh antara importir dan eksportir
      2. Barang-barang dan dokumen akan langsung dikirim oleh pembeli
      3. Eksportir kelebihan dana
      4. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang/menghalang-halangi transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir.

Dalam transaksi ini terdapat resiko sebagai berikut:

* + - 1. Eksportir tidak mendapat perlindungan/ kepastian apakah importir akan membayar
      2. Karena tidak ada bukti, maka dalam hal imporitir tidak membayar,eksportir sulit membuktikan dipengadilan bahwa ia mempunyai tagihan kepada importer
      3. Penyelesaian perselisihan akan menimbulkann ongkos bagi eksportir terutama bila ia harus datang ketempat importir.

1. Collection Draft(Wesel Inkasso)

Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari Open Account, sebab eksportir mempunyai hak dalam pengawasan barang- barang sampai draft weselnya diaksep atau dibayar. Eksportir atau penarik wesel (drawer) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya didalam negeri dikirim ke bank importir diluar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (drawee). Pemilikan atas dokumen tersebut diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan penagihan wesel tersebut telah terpenuhi. Dokumen dokumen tersebut dapat diserahkan kepada impotir atas dasar:

* + - 1. D/P (Document against Payment) ialah penyerahan dokumen kepada impotir dilakukan apabila importir telah membayar
      2. D/A (Documents against Acceptance) ialah penyerahan dokumen kepada importir apabila impotir telah mengaksep wesel yang bersangkutan.

Dalam sistem pembayaran ini pihak impotir berada dipihak yang beruntung karena:

* + - 1. Tidak perlu menyetor sejumlah uang menjamin pembukaan L/C
      2. Tidak perlu membayar biaya bank yang besar
      3. Tidak perlu membayar sebelum menerima dokumen-dokumen pemilikan barang.

1. Consignment (Konsinyasi)

Konsinyasi (*consignment*) adalah pengiriman barang-barang eksportir pada importir diluar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir.Barang-barang tersebut dikumpul dan dijual oleh impotir yang merupakan agen dari ekportir tersebut dan segera setelah barang-barang tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan oleh eksportir. Bilamana barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir. Dalam sistem konsinyasi ini eksportir tetap memegang hak milik atas barang, sedang impotir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual. Dengan demikian maka eksportirlah yang menanggung risiko yang mungkin terjadi,yakni antara lain:

* + - 1. Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan
      2. Tidak ada kepastian eksportir akan penerimaan pembayaran
      3. Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik,padahal pada saat tersebut barang tersebut belum dijual sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan seharusnya yang diterima.
      4. Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir dipengadilan.
    1. **Sistem Telegraphic Transfer PT. Sumatera Ocean Transindo**

PT. Sumatera Ocean Transindo dalam melakukan transaksi internasional menggunakan metode pembayaran *advance payment* dengan alat pembayarannya adalah *Telegraphic Transfer*. Mekanisme pembayaran advance payment yaitu importir akan membayarkan sebagian dari nilai transaksi ekspor, baru eksportir akan mempersiapkan barang sampai barang ready to export, sebelum barang dikirim importir harus mengirimkan pelunasan baru eksportir akan menyerahkan dokumen-dokumen ekspor kepada importir. Dalam kaitannya dengan alat pembayaran (pengiriman uang) PT. Sumatera Ocean Transindo menggunakan Telegraphic Transfer (TT). Telegraphic Transfer dipilih karena pengiriman uang melalui media ini akan lebih cepat sampai ke tangan eksportir. Untuk itu Telegraphic Transfer lebih sering digunakan sebagai sistem pembayaran ekspor oleh PT. Sumatera Ocean Transindo

Penggunaan *Telegraphic Transfer* sebagai sistem pembayaran dapat dilihat pada transaksi berikut ini, importir yang berasal dari Inggris yaitu perusahaan “OCEANIA SEA PRODUCTS PTY LTD” mengadakan kontrak perdagangan ekspor dengan PT. Sumatera Ocean Transindo yang terlebih dahulu dilakukan proses negosiasi. Barang yang akan di ekspor adalah *frozen baby octopus* yang masih berbentuk utuh. Jumlah *frozen baby octopus* yang akan diekspor sebanyak 12,000 kg dan senilai USD 54,720.00 (harga Cost and Freight (CNF) Sydney). *Frozen baby octopus* sudah jadi akan disusun kedalam kemasan ukuran 2 kg, setelah itu kemasan 2 kg sebanyak 6 bungkus di packing dalam kardus. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas barang, sehingga sebelum di packing harus dilakukan pemeriksaan atau seleksi berulang-ulang dari *frozen baby octopus* tersebut untuk memastikan kualitas sesuai dengan sample, selain itu juga untuk menhindari adanya cacat (beda ukuran, bau, atau kotor). *Frozen baby octopus* yang sudah dipacking kemudian dikirim melalui jalur laut. Barang dikirim dari pelabuhan Belawan Sumatera Utara ke pelabuhan Sydney Australia. Sistem pembayaran yang digunakan adalah Telegraphic Transfer sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Tahap-tahap pembayaran menggunakan Telegraphic Transfer akan dijelaskan sebagai berikut ini :

* + - 1. Importir yang berasal dari Australia yaitu perusahaan “OSP” dan PT. Sumatera Ocean Transindo melakukan negosiasi kemudian berakhir pada pembuatan *Sale's Contract.*
      2. Perusahaan “OSP" mengirimkan uang muka 20% dari total transaksi ke rekening PT. Sumatera Ocean Transindo yang ada pada Bank Danamon yaitu sebesar USD 13,680.00 sebagai tanda telah disepakai kontrak dagang tersebut.
      3. PT. Sumatera Ocean Transindo menyiapkan barang sesuai pesanan dari importir, setelah siap dilakukan packing kemudian barang dikirim ke pelabuhan atas pihak pelayaran. Saat barang dikirimkan, PT. Sumatera Ocean Transindo memberitahukan kepada perusahaan "OSP" bahwa barang telah dikirim disertai invoice, packing list, dan jadwal kapal. Perusahaan juga meminta pelunasan dari sisa pembayaran sebesar 80% dari nilai transaksi yaitu sebesar USD 54,720.00
      4. Setelah menerima pemberitahuan dari PT. Sumatera Ocean Transindo,perusahaan “OSP” segera melunasi sisa pembayaran sebesar 80% dari nilai transaksi yaitu sebesar USD 54,720.00 ke rekening PT.Sumatera Ocean Transindo yang ada di bank Danamon.
      5. Setelah menerima transfer dari perusahaan “OSP”, akan mengirimkan dokumen-dokumen seperti Bill of Lading, Surat Keterangan Asal Form AANZ, dan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui jasa pengiriman atau kurir seperti DHL.

Keuntungan dalam sistem pembayaran dengan TT :

1. Adanya Down Payment (DP) atau uang muka dapat digunakan untuk biaya produksi terlebih dahulu.
2. Kemudahan dalam bertransaksi karena dalam sistem ini pihak yang terlibat hanya eksportir dan importir, sehingga apabila terjadi wanprestasi maka lebih mudah pengurusannya,yaitu hanya intern antara importir dan eksportir karena bank dalam sistem ini Cuma sebagai pihak yang mentransfer uang dari importir ke eksportir.
3. Biaya bank sedikit karena bank hanya memungut biaya transfer saja.
4. Pencairan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.

Kerugian dalam sistem pembayaran dengan TT :

1. Keamanan tidak terjamin karena bank hanya sebagai pihak yang mentransfer uang dari importir kepada eksportir. Ketika terjadi non payment atau penundaan pembayaran bank tidak ikut bertanggung jawab.
2. Tidak ada penjamin kebenaran dokumen-dokumen yang dikirim PT. Sumatera Ocean Transindo kepada importir, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh buyer tersebut sedangkan dokumen sudah terlanjur dikirim maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab

Oleh sebab itu penggunaan sistem pembayaran menggunakan advance payment dengan Telegraphic Transfer ini biasanya untuk importir/buyer yang sudah merupakan langganan di PT. Sumatera Ocean Transindo, yang sudah memiliki kepercayaan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain.

Syarat utama dalam sistem pembayaran ini adalah adanya kepercayaan antara pihak eksportir dan importir, karena tidak adanya jaminan apapun supaya barang sampai ke tangan importir maupun pelunasan pembayaran dari importir. Sedangkan faktor yang mendukung terjalinnya kepercayaan dan hubungan baik antara eksportir dengan importir adalah ketika awal importir membali barang. Eksportir yakni PT.Sumatera Ocean Transindo menjual dan mampu mengirimkan barang tepat waktu,sedangkan importir juga mampu melakukan pembayaran dengan baik dan lancar.Selain itu, akan lebih baik lagi PT. Sumatera Ocean Transindo, melihat keuangan importir dalam kondisi baik maupun tidak untuk dilakukan pembayaran dengan menggunakan Advance Payment dengan Telegraphic Transfer.

Hambatan-Hambatan dalam Sistem Pembayaran Ekspor Telegraphic Transfer

1. Sering terlambatnya uang muka yang menghambat proses produksi

Uang muka digunakan untuk membiayai proses produksi,meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak tapi dapat menyebabkan kepincangan dalam pembiayaan produksi. Selain itu uang muka juga sebagai tanda keseriusan dalam pemesanan barang.

2. Potongan biaya dari bank yang cukup besar

Dalam setiap transaksi pengiriman uang atau transfer pastinya akan mendapat potongan dari pihak bank demikian juga dengan Telegraphic Transfer. Terkadang potongan yang dikenakan terlalu besar yang menyebabkan jumlah yang diterima dari nilai transaksi tersebut berkurang.

PT.Sumatera Ocean transindo melakukan ekspor frozen baby octopus ke perusahaan Australia “Oceania Sea Pproducts PTY LTD” dengan menggunakan metode pembayaran Telegrafhic Transfer. Metode ini dipakai karena ada down payment (uang muka) sebesar 20% dari total tagihan yang bisa meringankan modal kerja pihak eksportir.

Importir dari Australia yaitu perusahaan “Oceania Sea Products PTY LTD mengadakan kontrak perdangan ekspor dengan PT.Sumatera Ocean Transindo yng terlebih dahulu dilakukan negosiasi. Dalam negosiasi disepakati harga USD 54,720 untuk 12,000 kg, setelah harga disepakati maka importir mengirimkan uang muka 20% dari total tagihan USD 54,720.00 sebesar USD 10,944.00. Kemudian pihat PT.Sumatera Ocean Transindo (eksportir) memproses barang yang yang dipesan “OSP” selama satu minggu dengan ukuran kisaran 12 – 15 ekor per kg. Selama proses pengerjaan sampai pemuatan ke container disaksikan oleh perwakilan “OSP”, pengiriman frozen baby octopus menggunakan container 20” yang berisikan frozen baby octopus sebanyak 12,000 Kg senilai USD 54,720.00.

Sebelum pemuatan baby octopus, eksportir terlebih dahulu mempersiapkan Health certificate dan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), selanjutnya setelah kontainer berangkat, pihak PT.Sumatera Ocean Transindo (eksportir) menerima Bill of Lading dari pelayaran, dengan terbitnya Bill of Lading, maka pihak eksportir mengurus dokumen lainnya seperti Certificate of Origin / Surat Keterangan asal.

Lama pengiriman dari belawan ke Sydney selama 21 s/d 25 hari, setelah dokumen ekspor lengkap, maka pihak eksportir melakukan penagihan atas sisa tagihan sebesar 80%.

Pihak Importir belum dapat melakukan pelunasan sebelum barang diterima di gudang importer,Setelah barang diterima di gudang importer dan pihak importer keberatan atas baarang yang diterima dengan alasan tidak sesuai dengan ukuran yang mereka pesan.[[108]](#footnote-108) Importer mengatakan bahwa ukuran yang sampai digudang mereka ukuran 16-18 ekor per kg, deangan menggunakan alasan ini pihak importer tidak mau melakukan pelunasan jika tidak ada pemotongan harga dari pihak eksportir, karena tidak adanya diatur perjanjian selain harga di sales contract maka pihak eksportir tidak mempunyai posisi tawar. Pihak importer hanya memberi dua pilihan kepada pihak eksportir yaitu :

* 1. Barang dikembalikan ke Indonesia dengan catatan semua biaya yang timbul selama proses pemulangan ditanggung oleh pihak eksportir.
  2. Barang dapat diterima pihak importir dengan adanya pemotongan harga dari pihak eksportir.

Pada permasalahan ini pihak eksportir ditepatkan pada posisi yang dirugikan karena tidak ada kekuatan untuk menekan pihak importer dikarenakan tidak ada perjanjian sebelumnya.

Dalam kasus ini pihak eksportir hanya bisa melakukan negosiasi langsung dengan pihak importer dengan cara mendatangi pihak importer untuk melakukan penyelesaian langsung kedua belah pihak dengan cara musyawarah mufakat tanpa melibatkan pihak lainnya. Hasil kesepakatan sisa pembayaran 80% dipotong 10% sehingga eksportir haya menerima sisa pembaran sebesar 72% dari total tagihan. Kasus ini terjadi bulan februari 2023.

**BAB IV**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI IMPORTIR DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI SISTEM TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. SUMATERA OCEAN TRANSINDO**

Kontrak Perjanjian Penjualan dan Pembelian yang biasanya memuat syarat-syarat berdasarkan suatu periode waktu, penyerahan barang, spesifikasi produk yang dijelaskan dan dibahas secara rinci seperti; jumlah barang, harga barang, metode pembayaran, kemasan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak pembelian secara detail, dan lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Banyak hal yang harus disepakati/ negosiasikan sebelum menandatanganinya. Pembahas kontrak secara rinci dilakukan untuk menghindari atau memperkecil risiko yang ditimbulkan terutama terhadap risiko pembayaran. Adapun beberapa risiko yang menjadi perhatian pada perusahaan ekportir dan importir seperti;

* + - 1. Risiko gagal bayar; kegagalan pembayaran oleh importir yang merugikan eksportir.
      2. Risiko Pembiayaan; biaya yang dibayarkan importir untuk melakukan pembayaran.
      3. Risiko Transaksi; importir atau eksportir bertujuan melakukan penipuan.
      4. Risiko Mata Uang; naik turunnya nilai valuta asing.
      5. Risiko Pembayaran

Risiko Transportasi; biaya penggunaan asuransi Gagalan bayar, umumnya sering terjadi pada eksportir, untuk menghindari risiko tersebut diperlukan identifikasi risiko dalam bertransaksi. Banyak risiko yang ditimbulkan terhadap para importir atau pun juga eksportir. Untuk itu dalam melakukan transaksi selain perjanjian yang sudah berlandaskan hukum, diperlukan naluri bisnis dalam menilai mitra kerja. Kekuatan naluri (insting) juga sangat berperan dalam menentukan suatu kesepakatan. Dampak dari berbagai risiko kegagalan penerimaan pembayaran pada perusahaan eksportir skala Kecil Menengah dapat mengakibatkan kebangkrutan. Bagi perusahaan skala Kecil umumnya dihadapkan pada suatu dilema, disatu sisi mereka membutuhkan pesanan dari importir, dan disisi lain mereka memiliki keterbatas an informasi sehingga sering mengalami risiko pembayaran.

80

* + 1. **Hak dan Kewajiban Ekportir dalam Melakukan Pembayaran melalui Sistem Telegraphic Transfer pada PT. Sumatera Ocean Transindo**

Eksportir berhak menerima pembayaran dari importer, dan eksportir berkewajiban mengadakan barang (produk) sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dan menyampaikannya kepada importer (buyer), di tempat tujuan seperti yang telah diperjanjikan, dengan selamat.

Untuk sampai ke tempat importer di tempat tujuan dengan selamat, maka pendistribusian barang (produk) tersebut digunakan sarana angkutan yang umum dipakai dan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam sales contract. Dalam sales contract atau kontrak/perjanjian jual beli, melekat syarat-syarat penyerahan dan titik/tempat penyerahan barang, seperti diatur dalam ketentuan incoterm.

* + 1. **Hak dan Kewajiban Importir dalam Pembayaran melalui Sisktem Telegraphic Transfer pada PT. Sumatera Ocean Transindo**

Importir berhak menerima barang (produk) yang dia pesan/beli dari eksportir dalam keadaan baik dan sesuai dengan pesanan. Importir berkewajiban membayar barang (produk) pesanannya sesuai jumlah/harga yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pembayaran di dalam perdagangan ekspor impor ini dapat digunakan beberapa macam cara, tetapi untuk melindungi kepentingan pihak eksportir maupun importer, dalamperdagangan ekspor impor lazim dipergunakan letter of credit (dikenal juga sebagai documentary credit atau kredit berdokumen), yang dikeluarkan oleh bank, sebagai alat pembayaran seperti dikehendaki dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC).

Dengan dipergunakannya kredit berdokumen dalam transaksi perdagangan ekspor impor ini, maka semua pihak yang terlibat, hanya berurusan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang (produk), bukan dengan barangnya sendiri.

Importir berhak menerima barang (produk) yang dia pesan/beli dari eksportir dalam keadaan baik dan sesuai dengan pesanan. Importir berkewajiban membayar barang (produk) pesanannya sesuai jumlah/harga yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pembayaran di dalam perdagangan ekspor impor ini dapat digunakan beberapa macam cara, tetapi untuk melindungi kepentingan pihak eksportir maupun importer, dalamperdagangan ekspor impor lazim dipergunakan letter of credit (dikenal juga sebagai documentary credit atau kredit berdokumen), yang dikeluarkan oleh bank, sebagai alat pembayaran seperti dikehendaki dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC).

Dengan dipergunakannya kredit berdokumen dalam transaksi perdagangan ekspor impor ini, maka semua pihak yang terlibat, hanya berurusan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang (produk), bukan dengan barangnya sendiri.

* + 1. **Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir** **dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan Telegraphic Transfer** 
       1. Wanprestasi

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, dimana prestasi berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.[[109]](#footnote-109) Yahya Harahap mendefenisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadever goeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[[110]](#footnote-110)

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka perbuatan itu merupakan wanprestasi.

R.Subekti berpendapat bahwa wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :

* 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
  2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
  3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
  4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.[[111]](#footnote-111)

Pada proses pembayaran dengan metode *advance payment* dengan alat pembayaran *Telegraphic Transfer*, yang harus diperhatikan secara teliti beberapa hal yang bisa menjadi risiko yaitu ;

* + - 1. Importir melakukan wanprestasi, tidak melakukan pembayaran.
      2. Barang yang diterima importir tidak sesuai dengan yang dipesan dari sisi jumlah, spesifikasi atau kwalitas.
      3. Dokumen ekspor tidak sesuai dengan ketentuan terhadap barang yang diekspor, seperti; jumlah barang, bahan baku yang digunakan, menyebabkan barang tertahan di pelabuhan importir.
      4. Barang yang di kirimkan terlambat diterima oleh importir.
      5. Adanya kemungkinan larangan mengekspor ke negara importir secara tiba-tiba yang diakibatkan kejadian politik, perang dagang.

Seringkali terjadi wanprestasi dalam perdagangan internasional, bentuk pelanggaran umumnya sekitar masalah pembayaran, barang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan. Untuk penanganan hal tersebut biasanya menggunakan pendekatan secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila jalan damai yang ditempuh mengalami kebuntuan, maka permasalahan tersebut dapat dibawa ke Arbitrase International.

* + - 1. Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dalam Transaksi Ekspor Barang dengan Menggunakan *Telegraphic Transfer* (Studi PT. Sumatera Ocean Transindo).

Transaksi Dagang Internasional sarat dengan potensi melahirkan sengketa, Karena umumnya dalam perdagangan internasional melibatkan 2 (dua) negara dimana hukum dari negara - negara tersebut saling berbeda satu sama lainnya, maka benturan-benturan hukum antarnegara yang terlibat tidak dapat dihindari. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian oleh negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase[[112]](#footnote-112)

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase.[[113]](#footnote-113)

Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan, baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Biasanya pula kelalaian para pihak untuk menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketanya karena dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwewenang untuk memeriksa suatu sengketa. Lazimnya dalam sistem hukum *(Common Law)* dikenal dengan konsep *‘long arm’ jurisdiction*. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Misalnya, badan peradilan di Amerika Serikat dan Inggris kerap kali selalu menerima sengketa yang para pihak serahkan ke hadapannya meskipun hubungan atau keterkaitan sengketa dengan badan peradilan sangatlah kecil. Misalnya, pihak termohon memiliki usaha di Amerika Serikat atau dalam kontrak tersebut secara tegas atau diam-diam mengacu kepada salah satu negara bagian Amerika Serikat atau hukum Inggris[[114]](#footnote-114)

negara terdapat hubungan yang sangat erat dan saling dan jasa berdasarkan suatu kontrak, dan lain-lain.

Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketanya kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternatif di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian secara umum, yaitu berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang para pihak dapat gunakan, termasuk alternatif penyelesaian melalui pengadilan. Biasanya pula dalam klausul tersebut dimasukkan atau dinyatakan pula hukum yang akan diterapkan oleh badan penyelesaian sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

* + 1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip funda-mental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi, prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati. Termasuk dalam lingkup pengertian kesepaktan ini adalah: 1. bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak berupaya menipu, menekan atau menyesatkan pihak lainnya; 2. bahwa perubahan atas kesepakatan harus berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, pengakhiran kesepakatan atau revisi terhadap muatan kesepakatan harus pula berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

* + 1. Prinsip Kebebasan

Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means)[[115]](#footnote-115). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 The UNCITRAL Model Law on International Commercial Ar-bitration. Pasal ini memuat definisi mengenai perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal ini, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya[[116]](#footnote-116).

* + 1. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan (*arbitrase*) terhadap pokok sengketa. Kebebasan pan pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono)[[117]](#footnote-117).* Prinsip yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Contoh kebebasan memilih ini yang harus dihormati oleh badan peradilan adalah Pasal 28 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration adalah sebagai berikut. ‘The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute, siny designation of the law or legal system of a given state shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that state and not to its conflict of laws rules”*

* + 1. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip funda-mental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercemin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

* + 1. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip *Exhaustion of’Local Remedies* sebenarnya semula lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Dalam upayanya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini, Komisi Hukum Internasional PBB *(International Law Commission)* memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai ILC *Draft Articles on State Responsibility*. Pasal 22 ini menyatakan sebagai berikut. *“When the conduct of a state has created a situation not in conformity with the result of it by an international obligation concerning the treatment too be accorded to aliens, whether natural or juridical persons, but the obligation allows that this or an equivalent result may nevertheless be achieved by subsequent conduct of the state, there is a breach of the obligation only if the aliens concerned have exhausted the effective local remedies available to them without obtaining the treatment called for by the obligation or, where that is not possible, an equivalent treatment*[[118]](#footnote-118) Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah - langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh (exhausted). Dalam sengketa the Interhandel Case (1959), Mahkamah Internasional menegaskan: *“Before resort may be had to an international court... the state where the violation occured should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system. “[[119]](#footnote-119)*

Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa (internasional) pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak[[120]](#footnote-120)

Cara-cara sengketa di atas telah dikenal dalam berbagai negara dan sistem hukum di dunia. Cara-cara tersebut dipandang sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa yang diakui dalam sistem hukumnya. Misalnya, hukum nasional RI yang dapat ditemukan dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Negara lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

* 1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Menurut Munir, Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak[[121]](#footnote-121). Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah pertama, ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi ketika dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka[[122]](#footnote-122). Kelemahan kedua adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahanpermasalahan yang timbul di antara para pihak. Selain itu, jarang sekali ada persyaratan penatapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini[[123]](#footnote-123). Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif.[[124]](#footnote-124) Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur - prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut. Pertama, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa belum lahir (di sebut pula sebagai konsultasi); dan kedua, negosiasi digunakan ketika suatu sengketa telah lahir, prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

* 1. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia, dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Menurut Munir, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan maslaah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator.[[125]](#footnote-125) Usulah-usulan penyelesaian melalui mediasi dibuat agak tidak resmi (informal). Usulan ini dibuat berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh para pihak, bukan atas penyelidikannya. Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Oleh karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulanusulan yang dapat mengakhiri sengketa. Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedurprosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Hal yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulah-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketanya melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu pengadilan atau arbitrase.

* 1. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk k menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acap kali digunakan dengan bergantian. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun, putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketanya. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak. Contoh komisi konsiliasi yang terlembaga adalah badan yang dibentuk oleh Bank Dunia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing, yaitu the ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules) Namun dalam praktiknya, penggunaan cara ini kurang populer. Sejak berdiri (1966), badan konsiliasi ICSID hanya menerima dua kasus. Kasus pertama diterima pada 5 Oktober 1982. (Jadi selama 16 tahun kosong). Namun, sebelum badan konsiliasi terbentuk, para pihak sepakat mengakhiri persengketaannya. Kasus kedua, yaitu Tesoro Petroleum Corp. v. Government of Trinidad and Tobago diterima tahun 1983.32 Kasus ini berhasil diselesaikan pada tahun 1985 setelah para pihak sepakat untuk menerima usulanusulan yang diberikan oleh konsiliator[[126]](#footnote-126).

* 1. Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang disebut dengan pengadilan. Sudah sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun badan-badan pengadilan ini telah berkiprah. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok-tembok yuridis yang suka ditembusi oleh para justitiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis, dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Maka mulailah dipikirkan alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya adalah lewat badan arbitrase.[[127]](#footnote-127) Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional. Menurut Munir, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang bersifat swasta diluar pengadilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, dimana penyelesaian sengketa (arbiter) tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan, yang terdiri dari norang-orang yang tidak berkepentingan dengan perkara yang bersangkutan, orang-orang mana akan memeriksa dan memberi putusan terhadap sengketa tersebut[[128]](#footnote-128). Sedangkan arbitrase internasional adalah arbitrase lembaga maupun arbitrase ad-hoc, yang melibatkan pihak dari 2 negara yang berbeda.[[129]](#footnote-129) Adapun alasan utama mengapa badan arbitrase ini semakin banyak dimanfaatkan adalah sebagai berikut.

* + - 1. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang pertama dan terpenting adalah penyelesaiannya yang relatif lebih cepat daripada proses berperkara melalui pengadilan. Dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali seperti yang kita kenal dalam sistem peradilan kita. Putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat. Kecepatan penyelesaian ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.
      2. Keuntungan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah sifat kerahasiaannya, baik kerahasiaan mengenai persidangannya maupun kerahasiaan putusan arbitrasenya.
      3. Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih ‘hakimnya’ (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau u spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain.
      4. Keuntungan lainnya dari badan arbitrase ini adalah dimungkinkannya para arbiter untuk menerapkan sengketanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (apabila memang para pihak menghendakinya).
      5. Dalam hal arbitrase internasional, putusan arbitrasenya relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibandingkan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui misalnya pengadilan. Hal ini dapat terwujud antara lain karena adalam lingkup arbitrase internasional ada perjanjian khusus mengenai hal ini, yaitu Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.[[130]](#footnote-130)

Kelalaian menentukan forum ini akan berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian sengketa, karena dengan adanya kekosongan pilihan forum tersebut akan menjadi alasan yang kuat bagi setiap forum untuk menyatakan dirinya berwewenang untuk memeriksa suatu sengketa.

**BAB V**

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**
       1. Pengaturan Sistem Pembayaran Melalui *Telegraphic Tr*ansferpada PT. Sumatera Ocean Transindo sama dengan Perjanjian Jual Beli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1338 KHUPerdata, dimana perjanjian Jual Beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu dan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang - undang bagi para pihak.
       2. Pelaksanaan ekspor dengan menggunakan system pembayaran *telegraphic transfer* padaPT. Sumatera Ocean Transindo dilakukan sesuai perjanjian yang disepakati oleh para pihak yaitu Jenis Pembayaran Non Letter Credit, proses pembayaran dengan metode *advance payment* dengan alat pembayaran *Telegraphic Transfer* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa.
       3. Pertanggungjawaban hukum bagi importer dalam melakukan pembayaran melaluli system telegraphic transfer pada PT.Sumatera Ocean Transindo berdasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati oleh eksportir dan importer dalam sale’s contrac.

99

* + 1. **Saran**

1. Diperlukan adanya regulasi khusus terkait dengan pembayaran melalui *telegraphic transfer*, sehingga para pelaku ekspor impor khususnya importir agar tidak menimbulkan permasalahan dalam melakukan transaksi pembayaran sehingga dapat memberikan kepastian hokum terhadapat eksportir dan importir dalam transaksi perdagangan internasional.
2. Agar para pihak mencantumkan secara detail kapan waktu pembayaran melalui *telegraphic transfer* dilakukan importer dengan menyebutkan secara khusus dalam perjanjian sehingga ada kepastian waktu pembayaran bagi eksportir.
3. Dalam tahapan pembentukan *sales contract,* para pihak harus mencantumkan forum yang dipakai apabila terjadi sengketa serta mencantumkan klausul – klausul hak dan kewajiban para pihak secara detail sehingga terdapat batasan hak dan kewajiban antara eksportir dan importir.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia,* Jakarta: Cendana Press, 1983

Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta : Rajawali Press, 2002

Adhibroto Soepriyo, *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktek,* Semarang: Dahara Prize, 1992

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, Indonesia 1983

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta:Rineka Cipta, 2004

Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998

Asshiddiqie Jimly dan Safa’at M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indo nesia, 2006

Badrulzaman Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Budiono Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014

Cooke Gerald, Disputes Resolution in International Trading, in Jonathan Reuvid, The Strategic to International Trade, London: Kogan Page, 1997

Dewata Mukti Fajar Nur dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010

Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999

101

*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Bandung : Citra Aditya Bakti 2000

*Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,* Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005

Fence M.Wantu dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Reviva Cendekia,, 2010

Harahap M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Hartono Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,* Jurnal Pembaharuan Hukum , volume I no.I Januari – April 2017

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973

Harris D.J., *Cases and Materials on International IMW*, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998

HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),*  Jakarta : Sinar Grafika, 2002,

Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005

*Hukum dan Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Kansil C.S.T, Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi-bagian 2, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001

Kadir Muhammad Abdul, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2009

*Hukum Perikatan,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

*Hukum dan Penelitian Hukum,*  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Kamello Tan, *Hukum Jaminan Fidusia* *Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2015

Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997

Kartono Kartini, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : UII Press, 2012

Lubis. M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung: Mandar Maju, 1994

Nazir Moh, *Metode Penelitian,* Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005

Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008

*Penelitian Hukum Edisi Revisi 2005,* Jakarta:Kencana, 2014

Mertokusumo Soedikno, *Teori Hukum,* Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012

*Mengenal Hukum Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 1999

Moleong Lexy J, *Metode Kualitatif,* Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004

*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017

Meliala M Syamsudin, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* Yogyakarta : Liberty, 1985

Mukti Fajar Nurdewata dkk, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005

Miru Ahmadi & Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004

Prayudi Guse, *Seluk beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z,*  Yogyakarta : Pustaka Pena, 2007

Purba Hasim, *Hukum Perjanjian,* Medan: Fakultas Hukum Sumatera Utara, 2018

Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Bandung : Mandar Maju, 2000

Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang),* Bandung : CV.Mandar Maju, 1994

Raharjo Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Rahardjo Satjipto, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,* Jakarta: Kompas, 2003

*Ilmu Hukum.* Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000

Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996

Setiawan R*, Pokok-pokok Hukum Perikatan,*  Bandung : Putra A.Bardin, 1994

Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung : Bumi Cipta, 1997

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung : Alumni, 1979

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1995

Subekti R, *Hukum Perjanjian,* (*Cetakan Kedua)*, Jakarta : Pembimbing Masa, 1970

Subekti R, *Kamus Hukum,* Jakarta : Pradnya Paramita, 2005

Subekti R dan Tjiptrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* Jakarta: Balai Pustaka, 2017

Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata,* Jakarta : PT. Intermasa 2005

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta : Intermasa, 1987

Subakti R, dan Tjitrosudibio R, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Jakarta : *Pradya Paramita,* 1999

Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan:Pustaka Bangsa Press, 2005

Soekanto Soerjono, *Pengantar* *Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 2005

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar),* Jakarta: Raja Grafindo, 2002

Suhardo Etty Susilowati. *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP, Semarang, 2001

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Sinamo Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010

Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, Cet.1*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995

Susilo Andi, *Panduan Pintar Export Import*, Jakarta, Transmedia, 2013

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta : Kencana, 2008

Wuisman. JJJ M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,*  Jakarta: FE UI, 1996

Wiranata I Gede A.B, *Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi),*Tesis, Universitas Lampung, 2012

W Friedmann, *Teori dan Filsafat Umum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Widjaja Gunawan & Yani Ahmad,*Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Impor*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Wijaya I.G.Rai, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek,* Bekasi : Kesaint Blanc, 2004

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1985 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa

## Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor

## Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang

**Disertasi, Jurnal dan Makalah**

Damanhuri Fattah, 2013, “*Teori Keadilan Menurut Jhon Rowls”, Jurnal TAPIs,* Vol.9 no.2, Juli-Desembar.

Hartono Prasetyo, 2017, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,* Jurnal Pembaharuan Hukum , volume I no.I Januari – April.

**Internet**

Odhebora. Wordpress.com/2011/05/17/hak-kekayaan-intelektual/diakses tanggal 29 Desember 2023.

1. Etty Susilowati Suhardo, *Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri*, FH UNDIP, Semarang, 2001, hal. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Andi Susilo.2013. *Panduan Pintar Export Import*, Transmedia, Jakarta hal.23 [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 I Gede A.B. Wiranata, *Perdagangan Internasional (Kajian Hukum dan Ekonomi),*Tesis, Universitas Lampung, 2012, hal. 90 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soepriyo Adhibbroto, *Letter of Credit: Dalam Teori dan Praktek,*Dahara Prize, Semarang, 1992, hal 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80. [↑](#footnote-ref-5)
6. JJJ M, Wuisman, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,*(jilid I), FE UI, Jakarta, 1996, hal. 203. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum,* Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2012, hal. 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Umum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Solly Lubis, *op.cit.,* hal. 27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 23. [↑](#footnote-ref-10)
11. Soejono Soekanto, *Pengantar* *Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2005, hal. 121 [↑](#footnote-ref-11)
12. Guse Prayudi, *Seluk beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai Dari A-Z,*  Pustaka Pena, Yogyakarta, 2007, hal 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 4 [↑](#footnote-ref-13)
14. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal 123 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* hal 14-15 [↑](#footnote-ref-15)
16. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia,* Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hal 44 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hal 45 [↑](#footnote-ref-17)
18. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bumi Cipta, Bandung, 1997, hal 50 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992, hal 80 [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia,* Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia,* Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-21)
22. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-22)
23. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* hlm 20 [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hal. 60 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid,* hal. 41. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hartono Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan,* Jurnal Pembaharuan Hukum , volume I no.I Januari – April 2017, hlm 67. [↑](#footnote-ref-28)
29. Prof. R. Subakti, S.H dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang – undang Hukum Perdata, *Pradya Paramita,* Jakarta,1999, hlm 401. [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014, *tentang Perdagangan,* Pasal 1 ayat 17 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* [↑](#footnote-ref-34)
35. Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm 15. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1973, hlm 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 16. [↑](#footnote-ref-37)
38. Mukti Fajar Nurdewata dkk, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 134. [↑](#footnote-ref-38)
39. Kartini Kartono, *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 55. [↑](#footnote-ref-39)
40. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15. [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.,* hlm 16. [↑](#footnote-ref-42)
43. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 106 [↑](#footnote-ref-43)
44. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 30. [↑](#footnote-ref-44)
45. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tjinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13. [↑](#footnote-ref-45)
46. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar),* Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 194. [↑](#footnote-ref-46)
47. Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm 16.

    [↑](#footnote-ref-47)
48. Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 14. [↑](#footnote-ref-48)
49. Amiruddin Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 96 [↑](#footnote-ref-49)
50. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm 20 [↑](#footnote-ref-50)
51. Mukti Fajar, *Op. Cit*, hlm 109. [↑](#footnote-ref-51)
52. Munir Fuady*, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),* Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hlm.2. [↑](#footnote-ref-52)
53. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Kencana, Jakarta, 2008, hlm.197 [↑](#footnote-ref-53)
54. Mariam Darus Badrulzaman, *et.al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm.65 [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.78. [↑](#footnote-ref-55)
56. R.Subekti *Kamus Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-56)
57. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.161 [↑](#footnote-ref-57)
58. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Alumni, Bandung, 1979, hlm.4. [↑](#footnote-ref-58)
59. Wirjono Prodjodikoro-I, *Op.Cit.,*hlm.11 [↑](#footnote-ref-59)
60. Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2006, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-60)
61. Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm.92. [↑](#footnote-ref-61)
62. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Mandar Maju, Bandung , 2000, hlm.84. (untuk selanjutnya disebut “Wirjono Prodjodikoro-II”) [↑](#footnote-ref-62)
63. Kartini Muljadi-I,*Op.Cit*., hlm.2 [↑](#footnote-ref-63)
64. Mariam Darus-I,*Op.cit.,* hlm. 66 [↑](#footnote-ref-64)
65. Wirjono Prodjodikoro-II, *Op.Cit*., hlm. 84 [↑](#footnote-ref-65)
66. Fence M.Wantu dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Jakarta, 2010, hlm.13. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-67)
68. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.75. [↑](#footnote-ref-68)
69. Fence M. Wantu dkk, *Op.Cit.,* hlm.15. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ishaq, *Op.Cit.,* hlm.75 [↑](#footnote-ref-70)
71. Fence M. Wantu dkk., *Op.Cit.,* hlm.13 [↑](#footnote-ref-71)
72. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, 1987*,* hlm.14 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid.,* hlm.13. [↑](#footnote-ref-73)
74. I.G.Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek,* Kesaint Blanc, Bekasi , 2004, hlm.35 [↑](#footnote-ref-74)
75. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-75)
76. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang),* CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.68 (selanjutnya disingkat “Purwahid Patrik-II” [↑](#footnote-ref-76)
77. A.Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.19 [↑](#footnote-ref-77)
78. I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit.,* hlm. 47 [↑](#footnote-ref-78)
79. Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.111. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Ibid* [↑](#footnote-ref-80)
81. *Ibid* [↑](#footnote-ref-81)
82. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, Cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2 (selanjutnya disingkat “J.Satrio-I”) [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ibid*.,hlm.3 [↑](#footnote-ref-83)
84. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 156. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-85)
86. *Ibid.,*hlm.159 [↑](#footnote-ref-86)
87. Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.,*hlm.44 [↑](#footnote-ref-88)
89. Kartini Muljadi, *Op.Cit.,*hlm.93. [↑](#footnote-ref-89)
90. R.Setiawan*, Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Putra A.Bardin, Bandung, 1994, hlm.57 [↑](#footnote-ref-90)
91. Munir Fuady, *Op.Cit.,*hlm.49. [↑](#footnote-ref-91)
92. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.120. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-93)
94. *Ibid.*, hlm.121. [↑](#footnote-ref-94)
95. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.121. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.121. [↑](#footnote-ref-96)
97. Siswanto Sutojo,*Membiayai Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka,2001, hlm 1

    [↑](#footnote-ref-97)
98. C.S.T Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Dalam Ekonomi-bagian 2*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-98)
99. *Ibid., hlm 7* [↑](#footnote-ref-99)
100. Etty Susilowati Suhardo,2001, ***Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri***, Tesis Universitas Diponogoro,Semarang, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-100)
101. Hasil Wawancara dengan Hartono, Direktur PT. Sumatera Ocean Transindo, Medan, Senin, 12 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-101)
102. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-102)
103. Hasil Wawancara dengan Windy, Karyawan PT. Sumatera Ocean Transindo, Medan, Selasa, 13 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-103)
104. Hasil Wawancara dengan , Direktur PT. Sumatera Ocean Transindo, Medan, Senin, 12 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-104)
105. Hasil Wawancara dengan Hartono, Direktur PT. Sumatera Ocean Transindo, Medan, Senin, 12 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-105)
106. Hasil Wawancara dengan Angel, Staff Keuangan PT. Sumatera Ocean Transindo, Medan, Selasa, 13 Februari 2024 [↑](#footnote-ref-106)
107. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani,*Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Impor*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000 hlm 24 [↑](#footnote-ref-107)
108. Hasil Wawancara dengan Hartono, *Op Cit*, Senin, 17 April 2024 [↑](#footnote-ref-108)
109. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Mandar Maju, Bandung, 2000*,* hlm.17. [↑](#footnote-ref-109)
110. R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet-IV,* Pembimbing Masa, Jakarta, 1979,hlm.59. [↑](#footnote-ref-110)
111. R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian,* (*Cetakan Kedua)*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm.50. [↑](#footnote-ref-111)
112. Gerald Cooke, Disputes Resolution in International Trading, in Jonathan Reuvid, The Strategic to International Trade, London, Kogan Page, 1997 [↑](#footnote-ref-112)
113. (Gerald Cooke, *Ibid*.,hlm. 193 [↑](#footnote-ref-113)
114. (Gerald Cooke, *Ibid*.,hlm. 194 [↑](#footnote-ref-114)
115. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Rajawali Press, Jakarta, 2006 [↑](#footnote-ref-115)
116. Pasal 7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: ‘ “Arbitration Agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement [↑](#footnote-ref-116)
117. Pasal 38:2 Statuta Mahkamah Internasional: “This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree hereon.” [↑](#footnote-ref-117)
118. D.J. Harris, Cases and Materials on International IMW, London: Sweet and Maxwell, 5.ed., 1998, h.617. [↑](#footnote-ref-118)
119. Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Press, Jakarta, 2002 [↑](#footnote-ref-119)
120. Cf-, Pasal 33 Piagam PBB: “Theparties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution be negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or Other peaceful means of their own choicer [↑](#footnote-ref-120)
121. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 [↑](#footnote-ref-121)
122. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Op.Cit. h.201 [↑](#footnote-ref-122)
123. *Ibid* [↑](#footnote-ref-123)
124. *Ibid* [↑](#footnote-ref-124)
125. Munir Fuady, *Op. Cit* hlm.314 [↑](#footnote-ref-125)
126. Huala Adolf,  *Op.Cit*. hlm.206 [↑](#footnote-ref-126)
127. Munir Fuady, *Op. Cit* hlm.311 [↑](#footnote-ref-127)
128. Munir Fuady, *Op. Cit* hlm.311-312 [↑](#footnote-ref-128)
129. *Ibid* [↑](#footnote-ref-129)
130. Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan Keppres Nomor 34 Tahun 198 [↑](#footnote-ref-130)